



LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN
PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH
LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN I TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR



Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan pemantauan dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Dalam laporan juga disampaikan beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri lainnya.

Pada periode Triwulan I Tahun 2018, persentase realisasi penyerapan terhadap target mencapai 14,7 persen. Nilai ini lebih tinggi 2,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 12,3 persen, dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan satu, yaitu sebesar 13,36 persen. Rendahnya kinerja penyerapan tersebut, antara lain disebabkan oleh rendahnya persentase penyerapan pada beberapa instansi, antara lain pada Kemenag, Kemendes PDTT, kemehub, Kemenristekdikti, dan Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan I Tahun 2018, terdapat 22 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penarikan pinjaman. Beberapa kendala yang masih menjadi penyebab rendahnya kinerja proyek, antara lain permasalahan pembebasan lahan, pengadaan barang/jasa, kinerja kontraktor yang buruk, dan adanya gangguan cuaca yang ekstrim.

Pembelajaran (*lesson learned*) pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang dicantumkan dalam laporan ini, antara lain dari *proyek Village Development Programme* pada Kemendes PDTT yang memberikan pembelajaran tentang pentingnya penggunaan komunikasi melalui berbagai saluran komunikasi yang biasa dilakukan, misal telepon, email, wa, wa group, sms, dan aplikasi e-monev terbukti sangat membantu kelancaran pendampingan di lapangan. Pada *The Development of Sewerage System in Batam Island* di Badan Pengusahaan Batam, didapatkan pembelajaran mengenai pentingnya pencermatan perencanaan dan persiapan proyek sejak awal, termasuk semua permasalahan yang potensial menghambat pada saat proyek mulai dilaksanakan, sehingga pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan signifikan karena beberapa kali mengalami perubahan teknologi maupun ruang lingkup pekerjaan, dan target output.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang didapatkan dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DAFTAR ISTILAH

| | |
|--------------------|---|
| ADB | : Asian Development Bank |
| AFD | : Agence Francaise de Development |
| BIG | : Badan Informasi Geospasial |
| BPKP | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| BP Batam | : Badan Pengusahaan Batam |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| EU | : European Union |
| IDB | : Islamic Development Bank |
| IFAD | : International Fund for Agricultural Development |
| JBIC | : Japan Bank for International Cooperation |
| JICA | : Japan International Cooperation Agency |
| Kemenag | : Kementerian Agama |
| Kemendes PDTT | : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| Kemen KP | : Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| Kemennaker | : Kementerian Ketenagakerjaan |
| Kemendikominfo | : Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Kemen PUPR | : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Kemendikbud | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kemenuh | : Kementerian Perhubungan |
| Kementan | : Kementerian Pertanian |
| Kemen PPN/Bappenas | : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Kemenristekdikti | : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
| Kemenhan | : Kementerian Pertahanan |
| KSA | : Kreditor Swasta Asing |
| LIPI | : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| LPKE | : Lembaga Penjamin Kredit Ekspor |
| SLA | : <i>Subsidiary Loan Agreement</i> ; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah |
| PT. PII | : PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia |
| PT. Pertamina | : PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara |
| PT. PLN | : PT. Perusahaan Listrik Negara |
| PT. SMI | : PT. Sarana Multi Infrastruktur |

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) pada akhir Triwulan I Tahun 2018 (posisi 29 Maret 2018) adalah sebesar ekuivalen USD 17.908,1 juta, yang terdiri dari 150 proyek dan dilaksanakan oleh 14 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami kenaikan sebesar USD 1.493,8 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan nilai pinjaman ini disebabkan karena adanya beberapa proyek baru yang baru berjalan efektif. Sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebesar USD 7.052,0 juta. Sedangkan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 adalah USD 433,4 juta atau mencapai 14,7 persen dari target 2018 sebesar USD 2.944,9 juta. Persentase penyerapan ini meningkat sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan rata-rata penyerapan pada triwulan pertama tahun sebelumnya, yaitu 12,3 persen. Meskipun demikian, masih terdapat cukup banyak proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (penyerapan nol).

Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kinerja proyek, diantaranya adalah adanya gangguan cuaca yang ekstrim, rendahnya kinerja kontraktor, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Dalam laporan ini juga disampaikan pembelajaran (*lesson learned*) dari proyek yang masih berjalan dan proyek yang sudah selesai, serta uraian kinerja pelaksanaan dari beberapa proyek hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan.

PINJAMAN LUAR NEGERI

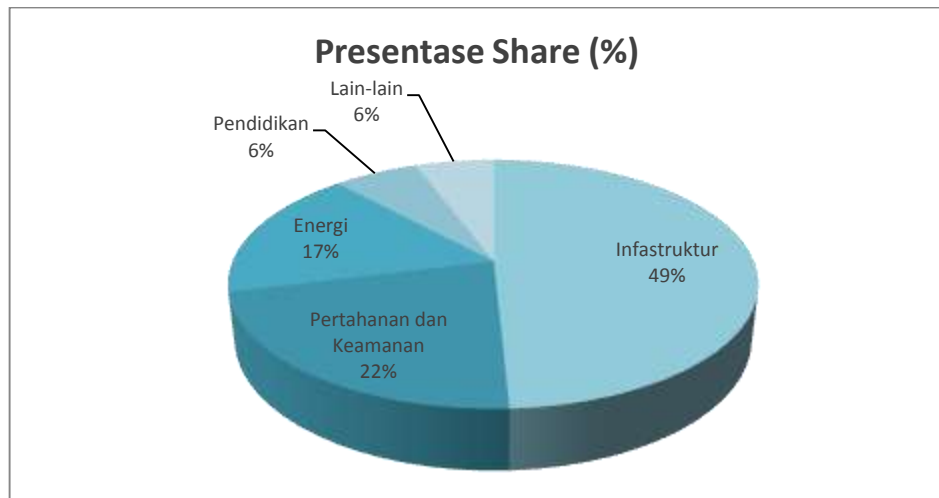
1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2018

Pinjaman luar negeri dapat dilihat profilnya berdasarkan pengelompokan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2018, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2017.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sebesar 66 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2017), terdapat penurunan komposisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan walaupun tidak signifikan, yaitu dari 22,1 persen menjadi 22 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor energi, yaitu dari 23,3 persen turun menjadi 17 persen. Selain itu, dalam periode yang sama, komposisi pinjaman di sektor pendidikan juga mengalami penurunan dari 7,7 persen menjadi 6 persen. Peningkatan komposisi pinjaman terjadi di sektor infrastruktur yang mengalami kenaikan signifikan dari 40,1 persen menjadi 49 persen. Sedangkan pada sektor lain-lain terjadi penurunan komposisi pinjaman, yaitu dari 6,8 persen menjadi 6 persen. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (closed).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(Ekuivalen Juta USD)

| Sektor | Jumlah Proyek | Nilai Pinjaman | Penarikan s/d Triwulan I TA 2018 | | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | Nilai | % | | Target | Realisasi | % |
| Infrastruktur | 46 | 8.877,1 | 2.655,0 | 29,9 | 6.222,1 | 1.224,0 | 200,2 | 16,4 |
| Energi | 17 | 2.946,8 | 1.158,3 | 39,3 | 1.788,5 | 356,8 | 62,0 | 17,4 |
| Pendidikan | 11 | 1.107,2 | 416,9 | 37,7 | 690,3 | 176,9 | 3,9 | 2,2 |
| Lain-lain | 11 | 1.032,5 | 635,9 | 61,6 | 396,6 | 49,5 | 10,4 | 20,9 |
| Pertahanan dan Keamanan | 65 | 3.944,4 | 2.185,9 | 55,4 | 1.758,6 | 1.137,7 | 156,9 | 13,8 |
| Total | 150 | 17.908,1 | 7.052,0 | 39,4% | 10.856,2 | 2.944,9 | 433,4 | 14,7 |

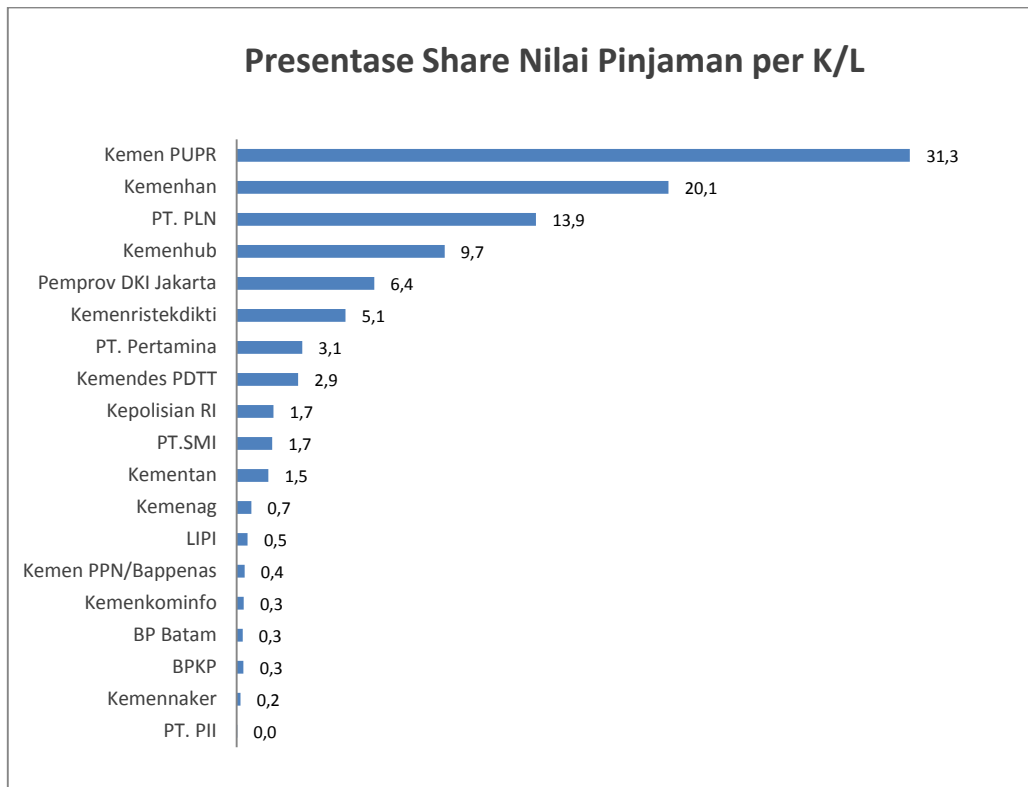
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu meningkat dari 12,3 persen menjadi 14,7 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, beberapa sektor pada triwulan pertama 2018 mengalami penurunan maupun peningkatan nilai penyerapan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Antara lain sektor energi, yang mengalami penurunan kinerja penyerapan cukup signifikan, yaitu dari nilai penyerapan 22,8 persen menjadi 17,4 persen. Kinerja di sektor pendidikan juga mengalami penurunan nilai penyerapan, yaitu dari 13,5 persen pada Triwulan I Tahun 2017, menjadi hanya 2,2 persen pada triwulan ini. Demikian pula sektor pertahanan dan keamanan, mengalami penurunan kinerja penyerapan dari 14,2 persen menjadi 13,8 persen. Namun, sektor infrastruktur mengalami peningkatan nilai penyerapan, yaitu naik dari 7,4 persen menjadi 16,4 persen. Peningkatan kinerja penyerapan yang sangat signifikan juga terjadi pada sektor lain-lain, yaitu dari 2 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi 20,9 persen pada triwulan ini.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab dapat dilihat dalam gambar 2.2. Proporsi terbesar masih berada di Kemen PUPR, Kemenhan, dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kemen PUPR dari 28,2 persen pada periode yang sama tahun lalu menjadi 31,3 persen pada triwulan ini. Kenaikan komposisi pinjaman juga terjadi di Kemenhan yang mengalami kenaikan dari 19,9 persen pada Triwulan I Tahun 2017 menjadi 20,1 persen pada triwulan ini. Sedangkan PT. PLN mengalami penurunan komposisi pinjaman yang cukup signifikan, yaitu dari 20,8 persen pada periode yang sama tahun lalu menjadi 13,9 persen pada triwulan ini.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Apabila dilihat dari nilai pinjaman, maka berdasarkan Tabel 2.2 terdapat kenaikan nilai pinjaman yang cukup signifikan dari Triwulan I Tahun 2017 ke Triwulan I Tahun 2018, yaitu sebesar USD 1.493,8 juta. Perubahan nilai pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada Kemen PUPR yang naik sebesar USD 1.043,2 juta, Kemenhub juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar USD 996,6 juta, dan Kemenhan juga mengalami kenaikan nilai pinjaman sebesar USD 366,2 juta.

Sedangkan PT. PLN mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 888,6 juta. Demikian juga dengan Kementerian PPN/Bappenas yang mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 109,4 juta, dan Kepolisian RI yang mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 52,6 juta. Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*), dan adanya proyek-proyek yang baru efektif.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

| Instansi Penanggung Jawab | Jumlah Proyek | Nilai Pinjaman | Penarikan s/d Triwulan I TA 2018 | | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | Nilai | % | | Target | Realisasi | % |
| Kementerian/Lembaga | 128 | 13.499,3 | 5.234,6 | 38,8 | 8.264,8 | 2.306,7 | 361,0 | 15,7 |
| BPKP | 1 | 57,8 | 49,3 | 85,3 | 8,5 | 10,1 | 3,3 | 32,3 |
| BP Batam | 1 | 50,1 | 12,0 | 24,0 | 38,0 | 2,4 | 0,6 | 22,9 |
| Kemenag | 1 | 123,8 | 1,8 | 1,5 | 122,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 |
| Kemendes PDD | 2 | 518,1 | 348,1 | 67,2 | 170,0 | 4,2 | 0,2 | 4,5 |
| Kemennaker | 1 | 32,5 | 27,3 | 84,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kemenkominfo | 1 | 59,3 | 58,8 | 99,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kemen PUPR | 36 | 5.665,0 | 1.780,0 | 31,4 | 3.885,0 | 758,7 | 174,2 | 23,0 |
| Kemenuh | 5 | 1.750,1 | 215,9 | 12,3 | 1.534,2 | 183,9 | 15,6 | 8,5 |
| Kementan | 4 | 267,5 | 120,2 | 44,9 | 147,3 | 23,8 | 3,9 | 16,2 |
| Kemen PPN/Bappenas | 1 | 66,4 | 27,6 | 41,5 | 38,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kemenristekdikti | 9 | 917,1 | 387,6 | 42,3 | 529,5 | 105,3 | 3,9 | 3,7 |
| Kepolisian RI | 19 | 311,1 | 182,3 | 58,6 | 128,9 | 261,8 | 20,6 | 7,9 |
| Kemenhan | 46 | 3.633,3 | 2.003,6 | 55,1 | 1.629,7 | 875,9 | 136,3 | 15,6 |
| LIPI | 1 | 47,4 | 20,3 | 42,8 | 27,1 | 8,9 | 2,5 | 27,9 |
| Diteruspinjamkan (SLA) | 20 | 3.251,4 | 1.174,4 | 36,1 | 2.077,0 | 370,5 | 62,9 | 17,0 |
| PT. PII | 1 | 4,6 | 3,7 | 79,6 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 80,9 |
| PT. PERTAMINA | 1 | 428,0 | 193,3 | 45,2 | 234,7 | 25,8 | 3,9 | 15,0 |
| PT. PLN | 16 | 2.518,8 | 965,0 | 38,3 | 1.553,8 | 331,1 | 58,1 | 17,6 |
| PT. SMI | 2 | 300,0 | 12,5 | 4,2 | 287,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| Diterushibahkan | 2 | 1.157,4 | 643,0 | 55,6 | 514,4 | 267,7 | 9,4 | 3,5 |
| Pemprov DKI Jakarta | 2 | 1.157,4 | 643,0 | 55,6 | 514,4 | 267,7 | 9,4 | 3,5 |
| Total | 150 | 17.908,1 | 7.052,0 | 39,4 | 10.856,2 | 2.944,9 | 433,4 | 14,7 |

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement* atau SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan I Tahun 2017), beberapa instansi penanggung jawab proyek mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan pada triwulan ini, yaitu BPKP, LIPI, Kemen PUPR, dan BP Batam. Beberapa instansi tersebut dikategorikan menjadi instansi yang memiliki kinerja penyerapan yang sangat baik karena telah melakukan penyerapan di atas 17,5 persen pada Triwulan I Tahun 2018, dan mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain terjadi peningkatan kinerja penyerapan pada beberapa instansi, pada triwulan ini juga masih terdapat cukup banyak instansi penanggungjawab yang belum melakukan penyerapan, sehingga tingkat penyerapannya masih sama atau bahkan belum melakukan penyerapan (nol).

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Sumber pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Kreditor Bilateral, Kreditor Multilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

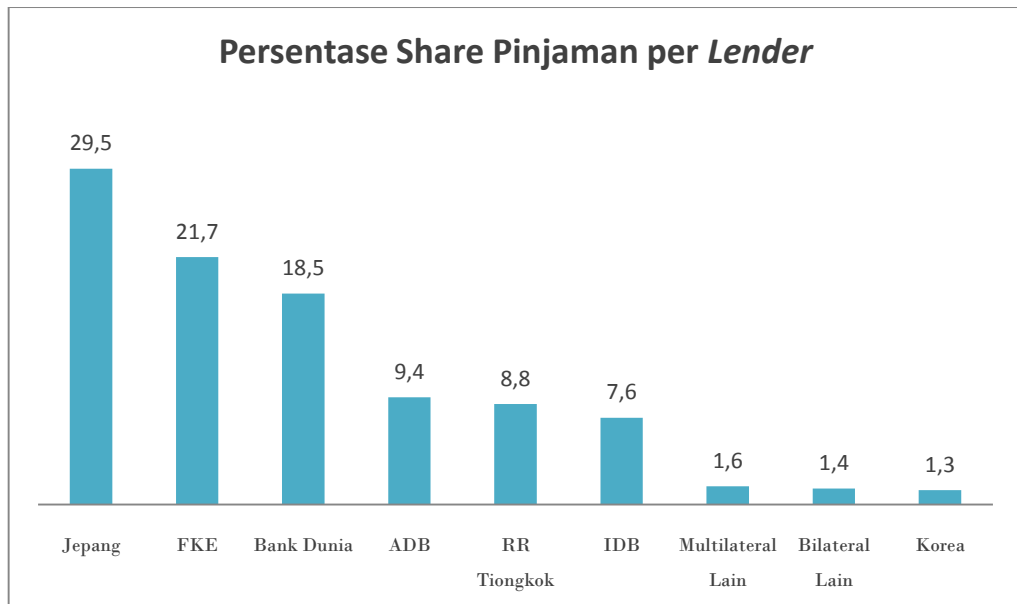
Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Hongaria, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, dan *Saudi Fund*.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong.

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund

- Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Hongaria, Jerman, Perancis, dan Spanyol

Sekitar hampir 70 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2017), terdapat perubahan yaitu menurunnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 21,5 persen pada Triwulan I Tahun 2017 menjadi 18,5 persen pada triwulan ini. Komposisi pinjaman LPKE juga mengalami sedikit penurunan dari 22 persen menjadi 21,7 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi pada komposisi pinjaman RR Tiongkok dari 11,0 persen turun menjadi 8,8 persen. Komposisi pinjaman Korea dari 1,7 persen turun menjadi 1,3 persen, dan komposisi pinjaman Bilateral lain turun dari 2,3 persen menjadi 1,4 persen. Sedangkan penurunan komposisi pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada komposisi pinjaman IDB yang turun dari 8,6 persen menjadi 7,6 persen.

Adapun kenaikan komposisi pinjaman terjadi pada komposisi pinjaman Jepang yang naik dari 24,6 persen menjadi 29,4 persen. Kenaikan komposisi pinjaman yang cukup signifikan juga terjadi pada komposisi pinjaman ADB yang naik dari 7 persen menjadi 9,4.

Dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2017, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 17.908,1 juta mengalami peningkatan sebesar USD 1.493,8 juta dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang baru efektif, sehingga beberapa pemberi pinjaman mengalami peningkatan nilai pinjaman. Peningkatan nilai pinjaman yang cukup signifikan dari triwulan lalu terjadi pada sumber pinjaman Jepang dari Kreditor Bilateral yang naik sebesar USD 1.311,4 juta dari USD 4.010,9 juta menjadi USD 5.322,3 juta. Kenaikan terjadi di sumber pinjaman dari Kreditor Multilateral, yaitu ADB naik sebesar USD 554,5 juta dari USD 1.143,1 juta menjadi USD 1.697,6 juta dan IFAD naik sebesar USD 104,4 juta dari USD 151,2 juta menjadi USD 255,6 juta.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Sumber Pinjaman | Jumlah Loan | Nilai Pinjaman | Penarikan s/d Triwulan I TA 2018 | Pinjaman Belum Ditarik | Target | TA 2018 | |
|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Realisasi | % |
| I | Kreditor Multilateral | 53 | 6.579,8 | 2.371,6 | 4.208,2 | 821,4 | 90,4 | 11,0 |
| | Bank Dunia | 21 | 3.217,6 | 1.569,6 | 1.647,9 | 343,4 | 25,9 | 7,5 |
| | ADB | 15 | 1.697,6 | 407,6 | 1.289,9 | 165,4 | 54,8 | 33,1 |
| | IDB | 12 | 1.374,1 | 278,7 | 1.095,4 | 292,2 | 9,1 | 3,1 |
| | IFAD | 4 | 255,6 | 107,0 | 148,6 | 10,5 | 0,6 | 5,7 |
| | Saudi Fund | 1 | 35,0 | 8,7 | 26,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| II | Kreditor Bilateral | 46 | 7.400,0 | 2.518,1 | 4.882,0 | 969,1 | 191,6 | 19,8 |
| | Jepang | 28 | 5.322,3 | 1.583,3 | 3.739,0 | 476,3 | 25,3 | 5,3 |
| | Hongaria | 1 | 36,4 | 16,3 | 20,1 | 2,8 | 3,0 | 100,0 |
| | Jerman | 1 | 92,6 | 2,5 | 90,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Korea | 4 | 229,3 | 80,4 | 149,0 | 45,0 | 6,6 | 14,7 |
| | Perancis+AFD | 2 | 108,8 | 91,1 | 17,7 | 17,0 | 0,5 | 2,9 |
| | RR Tiongkok | 9 | 1.593,4 | 727,7 | 865,7 | 418,2 | 147,2 | 35,2 |
| | Spanyol | 1 | 17,2 | 16,8 | 0,4 | 9,3 | 8,9 | 96,1 |
| III | KSA/LPKE | 66 | 3.928,3 | 2.162,3 | 1.766,0 | 1.154,4 | 151,4 | 13,1 |
| TOTAL | | 165 | 17.908,1 | 7.052,0 | 10.856,2 | 2.944,9 | 433,4 | 14,7 |

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2018 yang mencapai 14,7 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 13,1 persen, Kreditor Bilateral sebesar 19,8 persen dan Kreditor Multilateral sebesar 11,0 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek dari sumber pinjaman ADB dan Bank Dunia, yang masing-masing mencapai 33,1 persen dan 7,5 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek dari sumber pinjaman Hongaria dan RR Tiongkok, yaitu masing-masing mencapai 100 persen dan 35,2 persen.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN I TAHUN 2018

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk kedalam pemantauan triwulanan. Sedangkan pada tabel 2.5 dapat dilihat beberapa proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan I Tahun 2018.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan I Tahun 2018

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Nama/Jumlah Proyek | Instansi Penanggung Jawab | Lender | Nilai Pinjaman |
|--|--|---------------------------|--------|----------------|
| Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif | | | | |
| 1 | <i>The Development of Trans South-South Java Road Project</i> | Kemen PUPR | IDB | 250 |
| 2 | <i>Rentang Irrigation Modernization Project</i> | Kemen PUPR | JICA | 452,5 |
| 3 | <i>Komerang Irrigation Project (Phase 3)</i> | Kemen PUPR | JICA | 149,1 |
| 4 | <i>Bali Beach Conservation Project (Phase 2)</i> | Kemen PUPR | JICA | 92,5 |
| 5 | <i>Patimban Port Development Project (I)</i> | Kemenhub | JICA | 1.115,5 |
| 6 | <i>Development of World Class University with Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada</i> | Kemenristekdikti | JICA | 78 |
| TOTAL | | | | 2.137,6 |

Tabel 2.5 Rekapitulasi Proyek Tutup di Triwulan I Tahun 2018

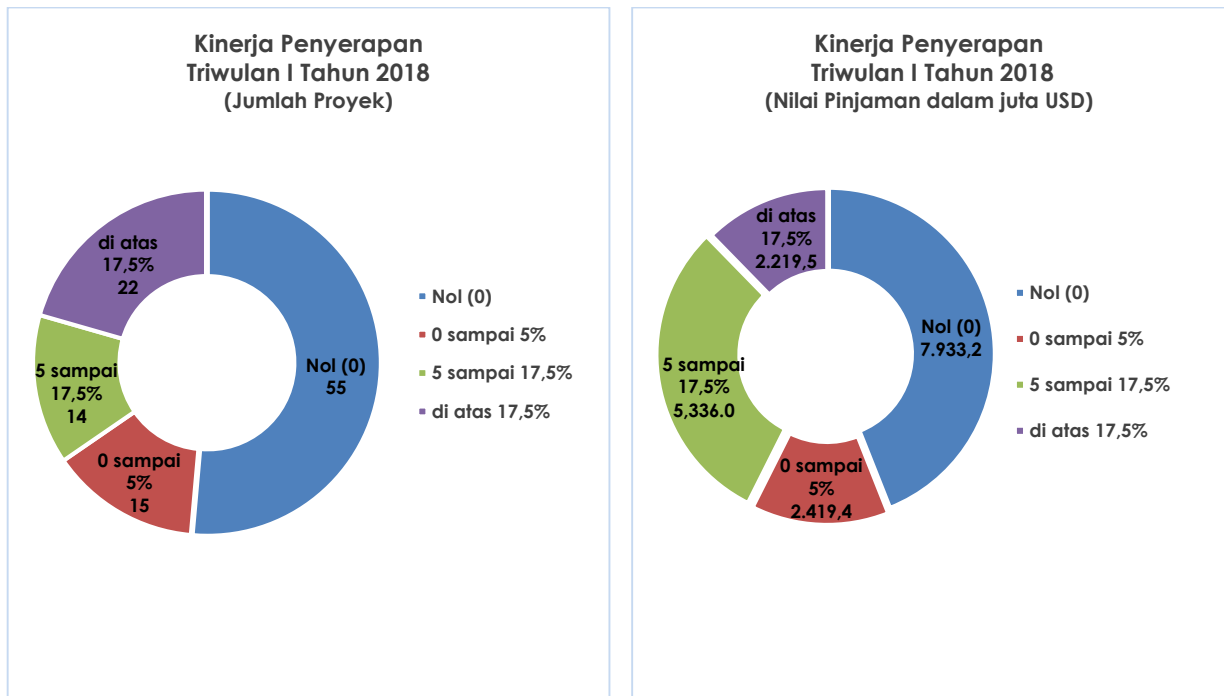
(Ekuivalen Juta USD)

| No | Nama/Jumlah Proyek | Instansi Penanggung Jawab | Lender | Nilai Pinjaman |
|--|---|---------------------------|---------|----------------|
| Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Berakhir Masa Berlakunya | | | | |
| 1 | <i>PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities</i> | PT. PLN | JICA | 4.203,7 |
| 2 | <i>The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)</i> | Kemenristekdikti | IDB-SF | 100 |
| 3 | <i>The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project</i> | Kemenristekdikti | IDB | 29,5 |
| 4 | <i>Animal Husbandry Technology and Practises Improvement to Accelerate Meat and Milk Production</i> | LIPI | Spanyol | 18,1 |
| 5 | <i>Coastal Community Development Project (CCDP)</i> | Kemen KP | IFAD | 34 |
| 6 | <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)</i> | LIPI | ADB | 45,5 |
| TOTAL | | | | 4.430,8 |

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2018

Berdasarkan target penyerapan tahun 2018, maka realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai 14,7 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen. Peningkatan realisasi penyerapan yang sangat signifikan terjadi pada proyek-proyek Kreditor Bilateral, sedangkan realisasi penyerapan untuk proyek-proyek *soft loan* dari Kreditor Bilateral cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian, capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat 22 proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, yaitu mampu mencapai realisasi penyerapan diatas 17,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat pula beberapa proyek yang belum melakukan penyerapan atau bahkan tidak mengalami pergerakan sejak mulai efektif sampai dengan Triwulan I Tahun 2018.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan Triwulan I Tahun 2018 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2018 (diolah)

Bila dilihat dari kinerja penyerapan, secara umum terdapat sekitar 22 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penyerapan tahun 2018. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 22 proyek tersebut bernilai USD 2.219,5 juta atau 12,3 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 17.908,1 juta. Sekitar 70 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 5 persen terhadap target tahun 2018. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan sejak proyek dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap proyek-proyek tersebut karena nilainya mencapai USD 10.352,6 juta atau 57,8 persen dari total nilai pinjaman.

Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses reviu terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya reviu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application* (WA) dan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi. Permasalahan lainnya yang saat ini mulai sering dilaporkan adalah rendahnya kinerja kontraktor yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, disamping masalah terkait lainnya seperti kekurangan tenaga kerja, material dan peralatan berat, serta kendala cuaca ekstrem dan kondisi geologi *site project*.

3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN PROYEK

Dalam Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun 2018, diuraikan 3 (tiga) proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Satu proyek merupakan proyek yang sudah tutup, yaitu *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)* yang dikelola oleh KKP, dan dua proyek lainnya merupakan proyek yang masih berjalan, yaitu *Village Development Programme* yang dikelola oleh Kemendes PDTT, dan *The Development of Sewerage System in Batam Island* yang dikelola oleh BP Batam.

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI), Kementerian Kelautan dan Perikanan

Coremap-CTI merupakan kelanjutan proyek *Coremap 2* yang dilaksanakan bersama oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusat Penelitian Oseanografi) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). *Coremap-CTI* dibiayai melalui *co-financing* antara ADB dan Bank Dunia. Pembagian lingkup kerja antara keduanya dilakukan berdasarkan lokasi kegiatan.

Coremap-CTI secara umum bertujuan memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang serta sumber dayanya.

Pendekatan *Coremap-CTI* adalah sistem dukungan dari lembaga pemerintah ke desa-desa pesisir untuk mempromosikan manajemen dan kontrol atas sumber daya pesisir secara desentralisasi. Pendekatan *Coremap-CTI* bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dengan membantu mereka untuk memperoleh karakteristik desa *Coremap-CTI* dan untuk terus melaksanakan desentralisasi pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya pesisir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, program *Coremap-CTI* dirancang untuk memiliki empat komponen utama, yaitu :

- a) Penguatan kelembagaan untuk pengelolaan terumbu karang:
 - Penguatan dan ekspansi pendekatan COREMAP.
 - Pemantauan ekologi dan sosio-ekonomi melalui CRITC.
 - Penguatan pengawasan ekosistem pesisir.
 - Pengembangan sumber daya manusia.
- b) Pengembangan pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem:
 - Dukungan untuk pengaturan tata ruang kelautan.
 - Penerapan pengelolaan Zona Pesisir Terpadu.
 - Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi laut dan spesies terancam.
 - Perintisan komunitas berdasarkan pendekatan yang tepat.
 - Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- c) Penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis kelautan:
 - Pembangunan infrastruktur dasar untuk ekoinvestasi.
 - Pembangunan model usaha berbasis kelautan Kelompok Produksi Berkelanjutan (KPB).
- d) Manajemen proyek, koordinasi dan pembelajaran.

Berdasarkan keempat komponen utama tersebut, maka keluaran dari *COREMAP-CTI*, antara lain:

- a) Pengelolaan yang efektif dari 10 kawasan konservasi laut nasional dan 13 kawasan konservasi laut kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait.
- b) Penguatan kelembagaan di 8 provinsi, 14 kabupaten/kota dan unit pelaksana lokal 6 KKP, dan Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang Lokal dan Nasional (CRITC).
- c) 100 unit inovasi kegiatan ekonomi berbasis ekonomi.
- d) Status pengamanan untuk 6 spesies punah dan terancam punah.

Adapun hasil yang diharapkan adalah pengelolaan berkelanjutan sumber daya terumbu karang dan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di lokasi proyek, termasuk:

- a) Bertahannya dan/atau peningkatan tutupan karang pada tingkat optimal di lokasi proyek.
- b) Pendapatan rumah tangga penerima manfaat inti proyek perusahaan meningkat 10-15% pada penyelesaian proyek di lokasi target.

- c) Efektifitas DPL meningkat setidaknya satu tingkat dalam status mereka berdasarkan kriteria efektifitas DPL dan sistem Pemerintah Indonesia.
- d) Peningkatan pendapatan penerima di lokasi proyek.
- e) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan terumbu karang menjadi rata-rata 85% di lokasi proyek.

Pembelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah kabupaten, unsur aparat keamanan di laut, KKP (pusat dan daerah), dan masyarakat setempat sangat penting dihimpun guna memastikan dukungan terus menerus terhadap kegiatan pengawasan sebagai upaya perlindungan ekosistem terumbu karang;
- b) Integrasi kegiatan ke dalam rencana pembangunan daerah Provinsi, Kabupaten, hingga Desa dengan alokasi anggaran adalah cara sangat konstruktif untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pengelolaan terumbu karang dan memberikan dukungan dana secara berkesinambungan;
- c) Keterlibatan multi pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan dan keberlanjutan program penyelamatan terumbu karang;
- d) Pengarusutamaan gender, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan mata pencaharian alternatif, merupakan strategi efektif untuk memberdayakan perempuan; dan
- e) Penguatan kelembagaan 55 LPSTK di tingkat desa telah membuat masyarakat desa menjadi kreatif dan bersemangat, tidak hanya dalam pengelolaan terumbu karang, melainkan juga dalam mengelola sumberdaya perairan lainnya, seperti rumput laut, teripang, budidaya ikan, dan lain-lainnya, termasuk juga ekowisata laut yang mulai berkembang di beberapa desa.

Village Programme, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Village Development Programme merupakan kegiatan yang didukung oleh IFAD untuk membantu pembangunan pertanian di daerah-daerah yang ditargetkan di pedesaan Papua dan Papua Barat, dua provinsi dengan penduduk pribumi dan etnis yang sangat besar. Secara khusus, program ini menyediakan dana untuk proposal produktif yang dikembangkan oleh masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif. Komunitas lokal dan organisasi berbasis komunitas, termasuk kelompok suku, juga berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan dan memantau kemajuan di tingkat desa.

Kegiatan yang dilakukan di bawah program ini termasuk perbaikan dalam infrastruktur pedesaan dan pasar, pasokan air dan sistem irigasi, serta akses ke layanan dasar di daerah pedesaan. Program ini memungkinkan masyarakat lokal menggunakan hibah untuk berinvestasi dalam barang publik yang meningkatkan mata pencaharian pedesaan melalui pengembangan tanaman dan ternak, hubungan pasar dan pengembangan rantai nilai, dan juga dengan merangsang ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja.

Komponen dan sub komponen dari *Village Development Programme* atau Program Pembangunan Desa Mandiri meliputi:

- a) Komponen 1 Penyelarasan Program dengan Dana Kampung:
 - Rencana pengembangan masyarakat yang efektif dan menyeluruh.
 - Pengelolaan dana desa secara transparan dan efektif.
 - Pemantauan dan pembelajaran (peningkatan kapasitas).
- b) Komponen 2 Fasilitas Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis:
 - Rekrutmen dan mobilisasi fasilitator.
 - Pelatihan fasilitator.
 - Manajemen dan dukungan tim fasilitasi.
- c) Komponen 3 Pemberdayaan Ekonomi:
 - Daerah dataran tinggi.
 - Daerah dataran rendah.
 - Wilayah pesisir.
- d) Komponen 4 Dukungan Manajemen.

Tabel 1. Data Umum Village Development Programme

| | |
|------------------------------------|--|
| Executing Agency | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| Nilai dan Sumber Pembiayaan | Pinjaman IFAD 755-ID sebesar USD 68.000.000 Hibah IFAD GC-1053-ID sebesar USD 400.000 |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | a) Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan b) Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis c) Pemberdayaan Ekonomi d) Pengelolaan Program |
| Lokasi | a) Provinsi Papua (6 kabupaten, 33 distrik, 150 kampung): Sarmi, Kepulauan Yapen, Boven Digoel, Yahukimo, Jayawijaya, dan Nabire b) Provinsi Papua Barat (7 kabupaten, 21 distrik, 18 kampung): Manokwari, Pegunungan Arfak, Mansel, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Maybrat |
| Masa berlaku | 17 Maret 2009 s/d 31 Desember 2018 |

Pada awalnya *Village Development Programme* dijadwalkan selesai pada 31 Maret 2018, tetapi pada tanggal 29 Desember 2017, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan usulan surat perpanjangan masa laku menjadi 31 Desember 2018. Perpanjangan masa laku dilakukan untuk mengakomodir pelaksanaan fasilitasi kegiatan *Village Development Programme* yang akan difokuskan kepada proses pendampingan dan pematangan dari kelompok eksisting serta dalam rangka mempersiapkan replikasi dan *scaling up* kegiatan.

Beberapa kemajuan pelaksanaan kegiatan *Village Development Programme*, antara lain:

- Telah teralokasinya dana desa di lokasi kampung *Village Development Programme* untuk mengembangkan pertanian dan ekonomi produktif di Papua dan Papua Barat.
- RKP Desa dinilai cukup baik dan rapi dari segi administrasi dan perencanaan yang diterjemahkan setiap tahun, meskipun keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan masih rendah.
- Telah dilakukan kegiatan sosialisasi *Village Development Programme* dan peningkatan *awareness* masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Kegiatan-kegiatan lainnya juga masih terus dilakukan menjelang berakhirnya program, antara lain:

- Pelatihan kepada fasilitator yang meliputi *coaching clinic*, *refresher training*, bimtek pengolahan, dan bimtek pelaku.
- Pembuatan bahan sosialisasi kegiatan, seperti pembuatan portal (*facebook*, *instagram*, *twitter*), *banner*, brosur, bacaan/komik, terutama tentang perencanaan pertanian partisipatif.
- Kerjasama dengan pihak ketiga (BRI, Bank Papua, Organisasi Kalimantan, Pasar Komoditi, dan sebagainya). Namun belum ada data yang akurat terkait jumlah dan bentuk kerjasama yang sudah dilakukan.
- Integrasi kegiatan dengan kegiatan sektor dengan melakukan konsolidasi lintas sektor dan program-program lainnya.

Adapun lokasi kegiatan *Village Development Programme* yang meliputi wilayah Papua dan Papua Barat secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Kegiatan *Village Development Programme*

| No. | Provinsi | Kabupaten | Distrik | Kampung | Pendamping |
|---------------|-------------|------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1. | Papua | Sarmi | 2 | 10 | 1 CoTL 65 Pendis 147 Penkam |
| | | Kepulauan Yapen | 6 | 30 | |
| | | Boven Digoel | 2 | 10 | |
| | | Yahukimo | 7 | 35 | |
| | | Jayawijaya | 11 | 55 | |
| | | Nabire | 5 | 10 | |
| Jumlah | | | 33 | 150 | |
| 2. | Papua Barat | Manokwari | 1 | 5 | 1 CoTL 42 Pendis 95 Penkam |
| | | Pegunungan Arfak | 2 | 10 | |
| | | Mansel | 2 | 10 | |
| | | Fakpak | 4 | 17 | |
| | | Kaimana | 3 | 10 | |
| | | Raja Ampat | 3 | 14 | |
| | | Maybrat | 6 | 12 | |
| Jumlah | | | 21 | 78 | |

Dengan adanya kegiatan *Village Development Programme*, sebagian besar masyarakat pedesaan di Papua dan Papua Barat sudah mulai teredukasi untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa (RKP Desa) secara partisipatif. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja, yaitu:

- Sekitar 70% masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- Sekitar 60% lebih dari jumlah kampung yang ada sudah mengalokasikan Dana Kampung untuk kegiatan ekonomi di desa-desa sasaran program.
- Sekitar 70% anggota kelompok juga terlibat secara aktif dalam pertemuan/musyawarah kelompok.
- Sekitar 70% petani mengadopsi teknologi yang telah dilatihkan, dan terdapat dukungan yang signifikan terhadap komoditi pertanian yang telah disepakati.

Secara keseluruhan kemajuan yang dicapai oleh kegiatan *Village Development Programme* dapat dilihat dari adanya tim manajemen yang kuat di tingkat nasional dan di Papua Barat, meskipun di Papua masih ditemukan adanya masalah dengan *co-team leader*. Kemajuan yang signifikan juga terlihat dalam perencanaan desa, kesadaran masyarakat, dan fasilitas peluang ekonomi. Fasilitator desa juga terlatih dengan baik dan merupakan titik kunci pembeda dari kegiatan *Village Development Programme*. Dalam hal ini, isu utama adalah pemahaman dan komitmen yang lemah dari kepala desa, serta adanya tuntutan dari masyarakat agar proses musyawarah dana desa dihormati. Umumnya masyarakat menginginkan adanya bagian yang lebih banyak untuk pemberdayaan ekonomi dan investasi pertanian, yaitu sekitar 10-20% dari alokasi dana desa.

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan setelah *Village Development Programme* berakhir masa lakunya, maka diperlukan adanya rencana *exit strategy* yang memadai dan dapat segera diaplikasikan. Dalam hal ini, masyarakat desa sebagai penerima manfaat dari kegiatan *Village Development Programme* perlu disiapkan untuk secara mandiri meneruskan kegiatan yang sudah berjalan.

Untuk itu diperlukan adanya *ownership* yang kuat dari masyarakat dan pendampingan yang lebih intensif dari fasilitator untuk menguatkan kelembagaan dan peralihan pembiayaan kegiatan. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti bank, LSM, dan sektor swasta perlu semakin diperkuat, sehingga masyarakat memiliki akses untuk memperoleh sumber pendanaan dan akses pasar yang lebih luas, yang akan menjamin kegiatan dapat terus dipertahankan keberlanjutannya.

Keberlanjutan kegiatan juga memerlukan adanya pelatihan yang lebih intensif tentang peran dan tanggung jawab kepala desa dalam proses musyawarah dana desa, tanpa pelatihan dikhawatirkan *Village Development Programme* akan berhenti di banyak desa. Penyebabnya adalah keputusan kepala desa yang cenderung *unilateral* yang menyebabkan ketegangan signifikan dan merongrong

kerja fasilitator desa. Dalam hal ini terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab terhadap pelatihan kepala desa, yaitu tim pemberdayaan desa yang lebih luas, *Village Development Programme*, dan Kemendagri.

Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan keberlanjutan kegiatan adalah perlunya tinjauan terhadap koordinasi yang sudah berjalan saat ini, antara pendamping desa, pendamping PPDM, dan petunjuk pertanian, apakah sudah sinergi atau justru *overlapping*. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan juga perlu terus diperkuat dan disempurnakan, sehingga dapat menyajikan data yang lebih valid yang dipilah berdasarkan gender.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perpanjangan program ke fase berikutnya adalah perlu adanya teknologi untuk meningkatkan inovasi dan rantai nilai mulai dari proses produksi, kualitas produk sampai ke pemasaran. Dalam *Village Development Programme* fase kedua sebaiknya juga tidak dilakukan penambahan lokasi kegiatan, tetap fokus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pembelajaran yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan *Village Development Programme*, antara lain:

- Mentalitas sebagian masyarakat dampingan telah terbiasa menerima bantuan dana secara langsung, sehingga memerlukan fasilitator yang lebih baik.
- Pola fasilitasi PPDM perlu distrukturkan lebih lanjut untuk memenuhi target secara optimal.
- Dengan mengutamakan fasilitator PNPM Pertanian, "penguasaan lapangan" oleh fasilitator lebih optimal.
- Penggunaan komunikasi melalui berbagai saluran komunikasi yang biasa dilakukan, misal telepon, email, WA, WA group, SMS, aplikasi e-monev terbukti sangat membantu kelancaran pendampingan di lapangan.

Gambar 2.5. Dokumentasi Kegiatan *Village Development Programme*

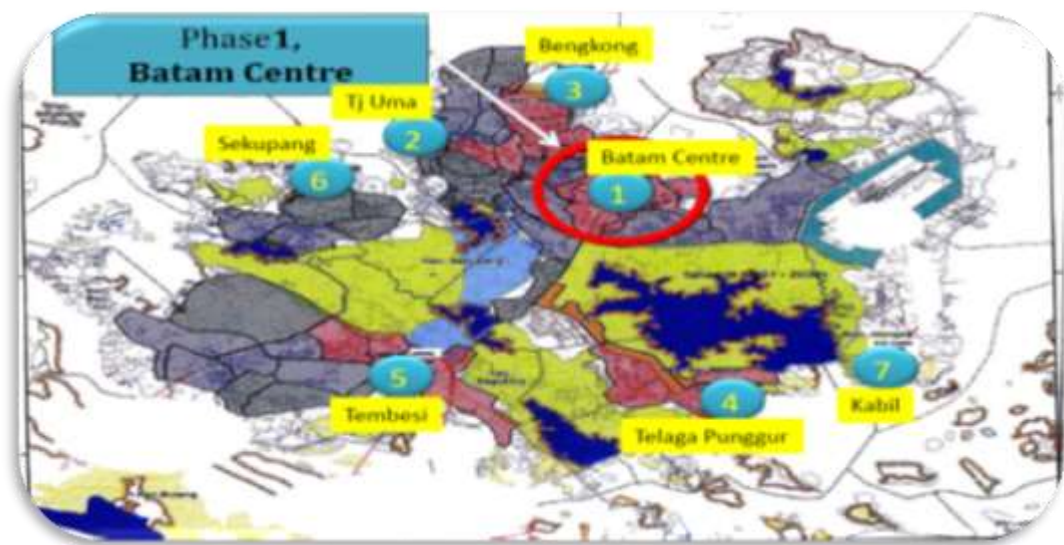


The Development of Sewerage System in Batam Island, Badan Pengembangan Batam

Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island* (INA-20) berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa hal yang melatarbelakangi proyek ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kawasan Batam, dimana sebagai kawasan tujuan investasi dan juga pariwisata, maka kondisi lingkungan harus tetap terjaga dari pencemaran limbah.
- b) Limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik akan mencemari media lingkungan khususnya perairan dan waduk-waduk, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air akibat pencemaran air, menjamurnya eceng gondok dan lain-lain.
- c) Selaras dengan program pemerintah Universal Akses 100-0-100, melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Visi dan Misi BP Batam.
- d) *Master Plan* Pengelolaan Air Limbah Domestik telah dibuat, dan merupakan studi bantuan INDI-AUS-AID tahun 2011, bahwa di Batam perlu dibangun 7 (tujuh) IPAL dan IPLT terintegrasi, yaitu di Batam Centre, Bengkong, Tanjung Uma, Sekupang, Tembesi, Telaga Punggur, dan Kabil.
- e) BP Batam telah membangun IPAL di Batam Centre sejak tahun 1995, dengan kapasitas 33 lt/dtk, saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas menjadi 230 lt/dtk atau 20.000 m³/hari dg lokasi IPAL di Bengkong Sadai untuk Tahap I.

Gambar 2.6. Lokasi Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island*



Tabel 1. Data Umum Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island*

| | |
|-------------------------|--|
| Executing Agency | Badan Pengusahaan Batam |
| Sumber Pembiayaan | Korea |
| Nilai Pinjaman Proyek | USD 50.000.000 |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (kapasitas 20.000 m³/dtk), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta <i>Commisioning and Training</i> b. Layanan Konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial <i>Project Executing Agency</i> (PEA) |
| Lokasi | Batam |
| Masa berlaku | 29 Desember 2014 s/d 29 Juni 2019 |

Adapun rencana BP Batam dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di kota Batam dalam rangka pengembangan air limbah menuju universal akses digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.7. Skema Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)



Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam proyek ini baru dilakukan secara intensif mulai akhir tahun lalu, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- a) Akibat keterlambatan pelaksanaan konstruksi, pihak kontraktor (Hansol) membutuhkan perpanjangan kontrak selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b) Terdapat potensi perubahan biaya karena adanya *upgrade* teknologi WWTP yang sudah disetujui oleh pihak EDCF dari sistem *Conventional Activated Sludge* (CAS) menjadi *Organica Food Chain Reactor* (OFCR) sesuai dengan surat INA-20/17-3098.
- c) Target sebanyak 11.000 SR dikhawatirkan tidak mampu dipenuhi oleh pelaksana proyek sampai dengan masa laku pinjaman selesai pada 29 Juni 2019.

Untuk mengatasi permasalahan yang masih mengganjal tersebut, telah dilakukan beberapa rencana tindak lanjut, yaitu:

- a) Pihak BP Batam akan segera mengajukan usulan perpanjangan kontrak dan masa laku pinjaman selama 1 (satu) tahun, walaupun pihak Hansol selaku kontraktor mengajukan perpanjangan hanya selama 6 (enam) bulan saja, Pihak BP Batam melihat adanya kemungkinan penyelesaian administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun dianggap paling realistik agar tidak ada perpanjangan lagi di kemudian hari. Pihak BP Batam juga akan melengkapi usulan perpanjangan dengan *explanatory note*.
- b) Pihak BP Batam juga akan memberikan *time schedule* yang lebih ketat kepada kontraktor mengingat tahun ini pelaksanaan proyek sudah ditargetkan akan menyerap alokasi anggaran sebesar USD 334 juta.
- c) Pembahasan lebih lanjut mengenai penanggung jawab pengelolaan OM (*operations and maintenance*) juga akan segera dibahas.
- d) Pekerjaan pembangunan stasiun pompa 1 yang terkendala tanah lunak akan segera diidentifikasi penyebabnya, apakah karena adanya curah hujan atau adanya aliran air di area tersebut, sehingga jebolnya/longsor pada *site pile* di area tersebut dapat dihindari.

Pembelajaran yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan *The Development of Sewerage System in Batam Island*, yaitu pentingnya perencanaan dan persiapan proyek. Perencanaan proyek harus dilakukan dengan cermat dan realistis, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan target output. Pemilihan teknologi juga harus sudah tuntas dibahas sebelum proyek efektif, sehingga tidak menyebabkan pelaksanaan proyek tertunda. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, maka pelaksana proyek perlu menetapkan target yang ketat kepada kontraktor, tetapi tetap menjaga keakuratan proses konstruksi, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dapat dipertahankan. Koordinasi dan kerjasama antara pelaksana proyek dan kontraktor juga perlu terus diperkuat, terutama dalam hal penanganan segera semua permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.

Gambar 2.8. Dokumentasi Kegiatan *The Development of Sewerage System in Batam Island*



HIBAH LUAR NEGERI

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerja sama pembangunan bilateral, dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil pemantauan selain digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan, juga digunakan sebagai pembelajaran dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2018 berjumlah 6 (enam) proyek hibah terencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 (dua) hibah terencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta 1 (satu) hibah langsung dari Kementerian Pertanian.

Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Hibah dari ADB senilai USD 1,5 juta ini mulai efektif sejak 19 Juni 2013 dan berakhir pada 30 Juni 2017, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi: i) Harmonisasi *ADB's Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguards System* di Indonesia; ii) Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia; iii) Penguatan persiapan proyek; dan iv) Pembangunan kapasitas (*capacity building*). Kegiatan hibah ini dilaksanakan bersama oleh beberapa instansi, yaitu: 1) Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral; 2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dari proyek hibah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Output 1 (komponen *safeguard*):
 - a) *Equivalence assessment dan workshop* hasil *assessment* terhadap *environment* dan *involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada tahun 2015.
 - b) *Acceptability assessment* terhadap *environment and involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada Juni 2016.
 - c) *Workshop* konsultasi temuan dan *action plan* untuk *equivalence and acceptability assessment* sudah dilakukan pada April dan Juni 2016.
 - d) Laporan *review sistem safeguard Indonesia (country safeguard review)* sudah dibuka untuk perhatian umum (*disclosed*), dan *feedback* dari masyarakat sudah diterima sampai dengan 30 Mei 2017. Konsultasi publik sudah dilakukan untuk pejabat pemerintah, swasta, mitra pembangunan dan masyarakat. Laporan CSR akan diinisiasi di awal bulan Juni dan akan dibuka kembali (*disclosed*) untuk perhatian umum.
- 2) Output 2 (komponen *procurement*):

Tiga dari empat keluaran kegiatan hibah ini sudah tercapai, yaitu: 1) *NCB Master bidding document* telah disetujui oleh ADB dan sudah digunakan untuk proyek ADB di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) *Draf standar dokumen pengadaan (Standard Bidding Document)* untuk pengadaan pekerjaan sipil, pengadaan kontrak rancang bangun untuk *international competitive bidding* sudah selesai; dan 3) Sistem pengadaan secara elektronik (SPS) untuk seleksi jasa konsultan internasional sudah diselesaikan dan diaplikasikan pada proyek-proyek ADB di Kementerian PUPR.
- 3) Output 3 (komponen penguatan kesiapan proyek (*project readiness criteria*)):
 - a) *Draf laporan analisis readiness criteria* sudah diperbaiki dan telah dikomentari oleh ADB IRM maupun Bappenas melalui beberapa FGD dan diskusi. FGD terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2017.
 - b) *Workshop* untuk menggali salah satu usulan kegiatan, yaitu mengenai implementasi pengadaan dini untuk proyek infrastruktur dengan pinjaman ADB sudah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017. Saat ini konsultan sedang mengembangkan 2 (dua) volume panduan dan *template-template* petunjuk dan pelaporan.

Sustainable Infrastructure Assistance Program, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Hibah *Sustainable Infrastructure Assistance Program* merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Australia (DFAT) yang diadministrasikan melalui ADB senilai USD 17,4 juta. Hibah ini dilaksanakan sejak 17 Juni 2013 dan akan berakhir pada 30 Juni 2019. Instansi pelaksana hibah adalah Direktorat Transportasi – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pengelolaan hibah ini dilakukan melalui *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Australia (DFAT), dan ADB.

Lingkup kegiatan dalam hibah ini terdiri dari *Technical Assistance* (TA) dan *Capacity Building* untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan infrastruktur kota lainnya (sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi, dan energi). Total TA yang berjalan adalah 9 (sembilan) TA, termasuk 3 (tiga) TA baru dan 2 (dua) TA yang sudah selesai dilaksanakan. Ketiga TA baru yang efektif di tahun 2016, yaitu:

- 1) TA 9116 INO: *Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway*.
- 2) TA 9113 INO: *Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia's Power Sector*.
- 3) TA 9109 INO: *Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery*.

Adapun TA yang sudah selesai dilaksanakan adalah TA 8506 INO: *Scaling up Hydro Development* dan TA 8508 INO: *IKK Water Supply Project*. TA lainnya yang sudah berjalan adalah:

- 1) TA 8484 INO: *Cluster Management Facility*.
- 2) TA 8518 INO: *Green Cities*.
- 3) TA 8530 INO: *Community Participation RRDP*.
- 4) TA 8666 INO: *MSMIP CDTA*.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan hibah ini, ADB sudah melakukan *review* dan menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada anggota *steering committee* untuk dimintakan tanggapan.

Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan *Technical Assistance* dari ADB ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+. Kegiatan hibah diharapkan akan berkontribusi terhadap dampak penggunaan sumber daya hutan secara lestari di *Heart of Borneo* (HOB) Indonesia dengan memperkuat kapasitas manajemen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. Dampak tersebut akan diukur dengan indikator: 1) Perluasan atau pemeliharaan tutupan hutan, 2) Kapasitas penyerapan karbon, dan 3) Pengurangan emisi karbon dioksida.

Hasil yang diharapkan dari proyek hibah ini adalah peningkatan pengelolaan sumber daya alam di HOB Indonesia. Perbaikan dalam manajemen akan tercermin dari indikator: 1) Memperkuat kapasitas pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di kelompok kerja HOB nasional, provinsi, dan kabupaten, dan 2) Menyelesaikan rencana hutan lindung di dua kabupaten di dalam unit pengelolaan hutan yang mapan di HOB Indonesia (Kapas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat dan Malinau di Provinsi Kalimantan Utara).

Kegiatan hibah dari ADB ini bernilai USD 4,5 juta dengan masa pelaksanaan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017. *Executing agency* dari kegiatan hibah ini adalah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan *implementing agency* adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Adapun lokasi kegiatan hibah meliputi desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu, dan desa Punan Long Adiu Kabupaten Malinau.

Secara umum pelaksanaan kegiatan hibah masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

- a) Pelaksanaan kegiatan mundur dari target *Annual Work Plan* 2017. Kondisi ini menjadi permasalahan mengingat kontrak PMC selesai pada November 2017.
- b) Realisasi anggaran cukup rendah, sehingga diperkirakan akan ada sisa dana hibah pada akhir proyek. Kemungkinan sisa anggaran akan dipersiapkan untuk pendanaan PES dan REDD+ di dua desa target atau untuk kegiatan pengelolaan di dua Taman Nasional.

Gambar 3.1. Dokumentasi Kegiatan Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo



HCFC Phase-Out In The Polyurethane Foam Sector Project, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka implementasi *HydroChloroFluoroCarbon* (HCFC) *Phase-Out Management Plant* (HPMP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan hibah HPMP pada industri manufaktur pengguna HCFC. Hal ini merupakan upaya memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Wina dan Protokol Montreal dalam mempercepat penghapusan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) jenis HCFC.

Dana hibah tersebut didapatkan pemerintah Indonesia dari negara-negara donor melalui lembaga *funding* multilateral, antara lain Bank Dunia. Pendanaan tersebut merupakan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Wina dan Protokol Montreal sebagai upaya penghapusan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) jenis *HydroChloroFluoroCarbon* (HCFC).

Protokol Montreal merupakan satu-satunya konvensi yang mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk menghapus konsumsi BPO dengan menyediakan dana kompensasi bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Terdapat berbagai jenis BPO yang banyak dikonsumsi manusia, yaitu *CloroFluoroCarbon* (CFC), *CarbonTetraClorida* (CTC), *Metil CloroFoam* (TCA), *HidroCloroFluoroCarbon* (HCFC), *Halon* dan *Metil Bromida*. Sejak tahun 2008, Indonesia telah melarang impor beberapa jenis BPO, yaitu CFC, CTC, TCA, *Halon* dan *Metil Bromida*. Sementara HCFC sebagian masih digunakan dalam beberapa sektor industri. Besaran hibah yang diterima Indonesia ditentukan sesuai dengan jumlah HCFC yang akan dihapuskan.

Hibah *HCFC Phase-Out In The Polyurethane Foam Sector Project* ini bernilai USD 2,71 juta yang dilaksanakan sejak 11 Juli 2015 dan akan berakhir pada 30 Juni 2018, dengan tujuan utama penghapusan konsumsi HCFC -141b sebesar 34,12 ODP ton di sektor manufaktur *foam* untuk mendukung penghapusan HCFC di Indonesia sebesar 10% dari *baseline* pada tahun 2015 dan 20% dari *baseline* pada tahun 2018.

Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatera Landscape, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah UNDP senilai USD 9,45 juta ini bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatera melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (*tiger recovery*) sebagai indikator keberhasilan.

Hibah *Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatera Landscape* terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) meningkatkan efektifitas lembaga pengelola kawasan lindung; 2) pengembangan sistem koordinasi lintas sektoral; dan 3) keberlanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati. Kegiatan hibah dilakukan pada empat lokasi, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Pelaksanaan kegiatan hibah diharapkan dapat memberikan beberapa output untuk setiap komponen sebagai berikut:

- a) Output komponen satu meliputi: 1) peningkatan kapasitas institusi pengelola; 2) penurunan ancaman harimau dan satwa mangsa; 3) peningkatan upaya patroli melalui SMART-RBM, dan 4) meningkatnya efektivitas pengelolaan.
- b) Output komponen 2 meliputi: 1) kasus kejahatan TSL yang disidangkan; 2) staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta staf pemda berpartisipasi dalam proses proyek percontohan kehutanan dan keanekaragaman hayati yang inovatif; dan 3) sistem pemantauan harimau dan satwa mangsa dikembangkan dan dioperasikan; 4) lebih dari 95% laporan konflik manusia-harimau dikaji dan/atau direspon sesuai dengan protokol mitigasi KSDAE pada tahun ketiga proyek.
- c) Output komponen 3 meliputi: 1) peningkatan sebesar lebih dari 25% untuk masing-masing dari tiga skor komponen dalam *financial sustainability scorecard*; 2) dua rencana pembiayaan berkelanjutan kawasan produksi melalui mekanisme bisnis dan keanekaragaman hayati (PES, CSR, serta kompensasi keanekaragaman hayati) yang melibatkan kemitraan PPP; dan 3) peningkatan sebesar lebih dari 25 persen untuk masing-masing dari tiap skor komponen dalam *financial sustainability scorecard*.

Secara umum perkembangan pelaksanaan hibah cukup baik, bahwa capaian beberapa indikator output melebihi target yang diharapkan. Namun, ada beberapa tantangan yang potensial dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan hibah, yaitu 1) banyaknya lanskap dan mitra, baik pemerintah maupun mitra LSM, sehingga dibutuhkan sistem komunikasi dan pelaporan yang efisien; 2) belum berjalannya *project board meeting* untuk menyepakati beberapa perubahan yang diusulkan dalam *inception workshop*; 3) tertundanya implementasi proyek dari saat penandatanganan dokumen mempersempit waktu pelaksanaan.

Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes (Tiger Core Area dan Panduan Monitoring)



Forest Programme I : Forest and Climate Change Program (Forclime), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Forest and Climate Programme (Forclime) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi REDD+ pada tingkat proyek yang nantinya mendukung kebijakan terhadap kerangka kerja REDD+ di tingkat subnasional maupun nasional. Kegiatan hibah ini terdiri dari dua modul, yaitu *Forclime Financial Cooperation* atau *Forest Programme I*, dan *Forclime Technical Cooperation*.

Forclime Financial Cooperation (Forest Programme I) merupakan hibah terencana senilai EUR 22 juta (termasuk 10 persen kontribusi dari Pemerintah Indonesia) yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), dan Malinau (Kalimantan Tenggara).

Tujuan dan capaian *Forclime Financial Cooperation* adalah sebagai berikut:

- a) Penurunan emisi karbon sebesar 300.000 – 400.000 Ton CO₂ eq per lokasi *Demonstration Activities*:
 - Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL): FREL kabupaten 3,42 Mt CO₂e per tahun, REL DA REDD+ 0,11 Mt CO₂ per tahun, RL DA REDD+ 0,10 Mt CO₂ per tahun. Capaian pengurangan emisi 130.000 CO₂ *net gain karbon* (2015-2016).
 - Pemetaan partisipatif batas administrasi 44 desa. Batas desa yang sudah ditandatangani Bupati sebanyak 9 desa.
 - Perencanaan guna lahan partisipatif 23 desa.
 - Inventarisasi lokasi investasi 36 desa.
 - Persemaian di 54 desa, produksi 2.199.595 bibit dan penanaman 1.157.983 batang (luas penanaman 3.729,7 ha yang melibatkan 5.095 KK).
 - Patroli perlindungan dan pengamanan hutan berbasis masyarakat di 47 desa dengan cakupan area per desa minimal 8.000 ha.
 - Monitoring keanekaragaman hayati di 41 desa.
 - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 41 desa.
 - Pembangunan demplot *silvofishery* sebanyak 1 unit.
 - Pembangunan demplot tanaman hortikultura sebanyak 3 unit.
 - Pembangunan demplot tanaman cabai dan buah masing-masing sebanyak 2 unit.
- b) Memperkuat pengelolaan hutan secara lestari, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui perhutanan sosial yang meliputi hutan desa 8 unit, hutan adat dan hutan kemasyarakatan, serta dukungan terhadap PHPL melalui RIL dan HCVF.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pengembangan fasilitator di tiga kabupaten (67 desa) sebanyak 310 orang, dan penyaluran dana ke masyarakat.

Forclime Technical Cooperation merupakan hibah langsung berupa bantuan teknis dari *German Ministry for Economic Cooperation and Development* senilai lebih dari EUR 35 juta sejak tahun 2009, dan baru akan berakhir pada tahun 2020. Hibah ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Tenggara), dan Sigi (Sulawesi Tenggara). Tujuan dari *Forclime Financial Cooperation* adalah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan, mengkonservasi keanekaragaman hayati, dan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui tiga area strategis, yaitu kerangka kebijakan nasional dan daerah, pembangunan KPH, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Sinergi atau *linkage* antara *Forclime Financial Cooperation* dan *Forclime Technical Cooperation* dapat diuraikan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 3.3. Skema Linkage Forclime FC dan Forclime TC

| <i>Forclime Financial Cooperation</i> | <i>Forclime Technical Cooperation</i> |
|--|--|
| Pengembangan <i>Demonstration Activities</i> (DA) di tiga kabupaten untuk modal penurunan emisi Gas Rumah Kaca | Output/pembelajaran model DA <i>Forclime Financial Cooperation</i> sebagai salah satu referensi (<i>baseline</i>) dalam pengembangan/penyusunan perda tentang Penurunan Emisi (REL tingkat kabupaten/provinsi) |
| PLUP sebagai referensi dalam penyusunan tata batas desa (output berupa SK Bupati tentang Tata Batas Desa untuk mencegah terjadinya konflik antar desa) | Program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan resolusi konflik (silabus pelatihan resolusi konflik) |
| Pengembangan komoditas HHBK dan jasa lingkungan (madu/rotan/wisata) di beberapa desa areal <i>Forclime Financial Cooperation</i> di dalam wilayah KPH | Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (LPHD) untuk teknik budidaya HHBK (madu, rotan, pengembangan desa wisata) di dalam areal KPH |

Gambar 3.4. Dokumentasi Kegiatan Hibah *Forclime*



Kegiatan utama *Forclime* meliputi beberapa kegiatan, yaitu (a) *Participatory Land Use Planning* (PLUP), (b) Persemaian masyarakat, (c) *Agroforestry*/penanaman, (d) Pemeliharaan, (e) Perlindungan hutan/patrolinya, (f) Pengembangan HHBK, (g) Perhutanan sosial, dan (h) Dukungan sertifikasi FSC. Adapun capaian dari kegiatan utama tersebut adalah:

- a) Emisi dikurangi di 5 DA sampai 2016: 1.028.919,86 tCO₂e atau 205.783.972 tCO₂e/DA.
- b) Luas area *agroforestry*: 4.989 Ha.
- c) Luas area patroli 2017: 168.462,67 Ha.
- d) Hutan Desa (2 di Berau, 3 di Kapuas Hulu).
- e) *Agroforestry*: 4.587 KK.
- f) Patroli Hutan Berbasis Masyarakat: 170 Tim.
- g) Demplot hortikultura dan *silvofishery* melibatkan 68 desa (\pm 10 desa di Mangrove).
- h) Untuk pengelolaan hutan lestari sudah dilakukan *reduce impact logging*, HCVF, dan dukungan sertifikasi FSC.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah ini dalam tahun 2017 lalu adalah:

- 1) Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan keterlambatan implementasi DIPA pada tahun 2017. Sehingga likuiditas DIPA kabupaten dan transfer aset memakan waktu lama. Transfer DIPA dari kabupaten ke Biro Perencanaan juga memerlukan penyesuaian dan pengaturan administratif.
- 2) *Replenishment* KfW membutuhkan waktu yang lama (\pm 2 bulan), sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana investasi dan kegiatan di lapangan, dan saldo Rekening Khusus di bawah batas yang ditentukan.
- 3) Penyesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Beberapa tantangan juga diperkirakan akan dihadapi oleh kegiatan hibah ini selanjutnya, antara lain:

- 1) Pengelolaan pasca panen produk HHK, HHBK, dan Jaslink antara lain pengemasan dan pemasaran.
- 2) Menjaga komitmen para pihak dalam mengembangkan hasil program kerjasama melalui *Forclime*.

- 3) Penguatan kelembagaan lokal, tata kelola administrasi desa, dan meningkatkan investasi produktif.
- 4) Ketahanan pangan melalui investasi berbasis penanaman, demplot pertanian dan perikanan.
- 5) Implementasi pengelolaan Hutan Desa untuk meningkatkan profil ekonomi desa.

Adapun *exit strategy* dari kegiatan ini juga sudah dipersiapkan, yaitu bagaimana mengelola keberlanjutan hasil program *Forclime* untuk menciptakan dampak kemanfaatan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat mitra melalui kegiatan diklat, *share learning*, dan sekolah lapang.
- 2) Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program *Forclime*.
- 3) Mendorong dukungan para pihak di daerah untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya.
- 4) Mengadopsi model-model kelola usaha kehutanan dan sumber daya alam dalam skema perhutanan sosial.
- 5) Mendorong adanya kelembagaan usaha kelola HHK, HHBK dan Jaslink dengan skema PS.

Forest Program III : Sulawesi Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah *Forest Program III* ini dibiayai oleh KfW dengan total dana sebesar EUR 13.500.000, dan akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) tahun dari 2017 sampai dengan 2023. Tujuan pelaksanaan kegiatan hibah ini adalah implementasi pengelolaan bersama dan terpadu *landsekap* Lore Lindu, serta mendukung pengembangan dan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kerangka Strategi Nasional REDD+ di Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan pokok dari hibah ini adalah pengelolaan kerjasama yang terpadu terhadap Bentang Alam Lore Lindu.

Executing agency dari kegiatan hibah adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan *implementing agency* yaitu:

- 1) Balai Besar TN Lore Lindu, Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- 2) Balai Pengelolaan DASHL Palu-Poso, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- 3) Balai PSKL wilayah Sulawesi, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan hibah *Sulawesi Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape*, yaitu: a) perlunya dukungan terhadap upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, b) perlunya program integrasi pengelolaan DAS sebagai upaya alokasi pemanfaatan lahan, perencanaan tata ruang, dan perlindungan hutan dalam satu *landscape* ekologi, 3) Sulawesi Tengah memiliki *species endemic* dan keanekaragaman hayati yang tinggi, 4) TN Lore Lindu merupakan zona inti dari Cagar Biosfer Lore Lindu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka output yang diharapkan dari pelaksanaan hibah ini adalah:

- 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu dengan cara a) menjalin hubungan baik antara TN Lore Lindu dengan pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, b) mendukung upaya restorasi kawasan yang terdegradasi, c) memecahkan permasalahan perambahan secara partisipatif, d) penegakan hukum sebaik mungkin, e) monitoring keanekaragaman hayati.
- 2) Rehabilitasi hutan yang terdegradasi di Sub DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Huku Lariang dengan cara a) meningkatkan target, aplikasi teknis, dan monitoring program yang dilaksanakan oleh BPDASHL Palu Poso, b) mendorong pembangunan hutan alam campuran yang sejalan dengan sasaran dan target Cagar Biosfer Lore Lindu dan TN Lore Lindu.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan TN Lore Lindu dan Cagar Biosfer Lore Lindu.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.

Kegiatan hibah yang sudah berjalan selama satu tahun ini cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan, antara lain a) kegiatan dalam DIPA awal kurang sesuai dengan *Annual Work Plan (AWP)*, sehingga diperlukan adanya revisi AWP maupun DIPA, dan b) proses *replenishment* membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pencairan terhambat.

Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam tahun 2017 meliputi:

- 1) Patroli bersama masyarakat.
- 2) Penyusunan rencana pemulihan ekosistem.
- 3) Penelitian oleh Universitas Tadulako-IPB.
- 4) Persiapan Kemitraan Konservasi Masyarakat.
- 5) Rehabilitasi Hutan Lindung seluas 300 ha.
- 6) Pembangunan konservasi tanah dan air (DAM penahan 20 Unit).
- 7) Penyusunan *baseline project*: pengelolaan DAS, sosial ekonomi.
- 8) Pengadaan peralatan dan bangunan SPAS (Stasiun Pengamat Arus Sungai) 2 unit.
- 9) Pembekalan fasilitator.

Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW) senilai € 8.460.000 ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ekosistem Leuser berkelanjutan dalam rangka menurunkan deforestasi dan merestorasi hutan yang terdegradasi, sehingga berkontribusi pada konservasi di kawasan yang memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di Asia. Kegiatan hibah ini dimulai sejak 28 November 2016, dan akan berakhir pada 31 Desember 2019.

Lokasi kegiatan hibah berada di bagian terbesar dari ekosistem Gunung Leuser, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan kota Subulussalam.

Pelaksanaan kegiatan hibah diharapkan dapat memberikan beberapa output sebagai berikut:

- a) Output pertama yang dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi Aceh, yaitu mendukung pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di 3 (tiga) kabupaten dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan ekosistem Gunung Leuser (minimum 40 desa) melalui kegiatan:
 - Perencanaan penggunaan lahan dan tata batas area konservasi.
 - Penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi konservasi termasuk Hutan Rakyat dan *agroforestry*.
 - Pembangunan Pusat GIS untuk mendukung MRV dan perencanaan penggunaan lahan.
- b) Output kedua yang dilaksanakan oleh UPT BKSDA Aceh dan BBTN Gunung Leuser adalah meningkatkan kapasitas instansi terkait dalam hal konservasi melalui kegiatan:
 - Pembentukan tambahan Unit Pengendali Konflik CRU dan dukungan terhadap CRU yang ada.
 - Pengelolaan SM Rawa Singkil.
 - Pembangunan stasiun rehabilitasi orang utan dan penelitian orang utan di TN Gunung Leuser.
 - Dukungan terhadap TN Gunung Leuser infrastruktur dan pengembangan koridor Trumon.
 - Penetapan kajian penyelesaian konflik harimau.

Secara umum perkembangan pelaksanaan hibah cukup baik, beberapa capaian dari masing-masing output antara lain: 1) reboisasi hutan rakyat dan *agroforestry*, 2) penetapan batas TNGL dan batas desa, 3) kesepakatan konservasi desa, 4) mitigasi konflik satwa, 5) sosialisasi patroli, 6) pendidikan konservasi, *smart patrol*, dan konservasi penyusu/orang utan. Beberapa kegiatan juga telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2018 ini, yaitu:

Dinas LHK Provinsi Aceh:

- 1) Melaksanakan *Partisipatif Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Land Use Planning* (PLUP) dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) di minimal 14-20 desa.
- 2) Melaksanakan patroli desa di minimal 40 desa.
- 3) Melaksanakan operasi 24 Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan kapasitas 950.000 bibit.
- 4) Melaksanakan penanaman minimal 700 Ha dengan model reboisasi dan pengayaan (ekorestorasi).
- 5) Melaksanakan Hutan Desa Lisensi minimal 3.000 Ha.
- 6) Melaksanakan Kesepakatan Konseravsi di minimal 14 desa, dan PES di minimal 40 desa.
- 7) Latihan dan studi untuk staf dan masyarakat.
- 8) Membina tiga produk non kayu (rotan/kerajinan, madu, gula aren/nipah).
- 9) Kelembagaan di 26 desa.
- 10) Batas rekonstruksi 66 km, dan bisa ditambah.

BKSDA Aceh:

- 1) Dukungan untuk penguatan manajemen SM Rawa Singkil.
- 2) Dukungan untuk rehabilitasi stasiun Orang Utan di SM Rawa Singkil dan mengembangkan pendekatan ekowisata untuk stasiun di Lai Trup.
- 3) Dukungan untuk findakan resolusi konflik satwa liar (gajah, orang utan, dan beruang).
- 4) *Smart Patrol*, Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.
- 5) Pendidikan konservasi bagi masyarakat.
- 6) *Study Tour*.

BB TN Gunung Leuser:

- 1) Dukungan untuk pengelolaan Rawa Kluet.
- 2) Rehabilitasi stasiun riset orang utan di Suaq Belimbing.
- 3) Pelaksanaan penelitian harimau untuk menyelesaikan konflik satwa liar dengan harimau.
- 4) Rehabilitasi stasiun penyu di Rantau Sialang.
- 5) *Smart Patrol*, Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.
- 6) Pendidikan konservasi bagi masyarakat.
- 7) *Study Tour*.

Beberapa tantangan atau permasalahan yang potensial dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah adalah:

- 1) Kegiatan pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksanakan karena revisi SA dan *Contract Agreement* tentang pengalihan pelaksana dari konsultan ke Dit. KK memerlukan waktu yang lebih dari waktu yang tersedia.
- 2) Beberapa kegiatan di lapangan masih dalam penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.
- 3) Proses *disbursement* memerlukan waktu yang relatif lama.

Gambar 3.5. Dokumentasi kegiatan Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem



Sustainable Palm Oil Initiative, Kementerian Pertanian

Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan perkiraan pertumbuhan produksi tahunannya sekitar 10 persen. Mengingat potensi sawit yang sangat besar, Pemerintah Indonesia berupaya melipatgandakan produksi minyak sawit menjadi 40 juta ton pada tahun 2020. Untuk meningkatkan produksi tersebut, maka dibutuhkan sedikitnya 5 sampai 20 juta hektar lahan untuk kebun sawit baru. Ekspansi pembukaan lahan baru tersebut mengancam hutan tropis dan lahan gambut yang tersisa. Namun, terdapat pula peluang untuk meningkatkan produktifitas melalui peningkatan keuntungan dan penggunaan lahan terdegradasi.

Kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan potensi ekonomi, serta menjaga kelestarian ekosistem dan masyarakat adalah hal yang sangat mendasar untuk mengamankan masa depan hutan Indonesia maupun meningkatkan mata pencaharian melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk keperluan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk skema sertifikasi nasional yang disebut ISPO (*The Indonesian Sustainable Palm Oil*), yang menuntut produsen untuk mematuhi semua regulasi terkait produksi minyak sawit, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap pekerja dan komunitas sosial.

UNDP mendukung operasionalisasi dan optimalisasi ISPO karena meliputi semua produsen di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem hukum Indonesia. Selain ISPO, RSPO (*Roudtable for Sustainable Palm Oil*) juga penting untuk diperhatikan karena memberikan standar

praktik terbaik. Sehingga kolaborasi kedua skema tersebut sangat penting untuk masa depan sektor minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Inisiatif Minyak Sawit Berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil Initiative* (SPOI) adalah kemitraan swasta utama yang mendukung produksi sawit berkelanjutan sambil meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. SPOI bertujuan untuk mempromosikan minyak sawit lestari dengan mengurangi deforestasi dan memberikan dukungan kepada perubahan struktural di sektor ini melalui fokus pada beberapa area strategis sebagai berikut:

- Memastikan pemangku kepentingan minyak sawit di Indonesia terkoordinasi dengan baik melalui *platform* minyak sawit nasional, yaitu dengan:
 - Memfasilitasi koordinasi pemangku kepentingan minyak sawit melalui keterlibatan pemerintah untuk mendorong pelembagaan dan keberlanjutan, keterlibatan sektor swasta, LSM, masyarakat lokal, dan organisasi petani kecil.
 - Menyediakan akses terhadap pembuatan kebijakan pemerintah (rekomendasi kepada ISPO dan peraturan mendasar lainnya).
- Memperkuat petani kecil untuk memperbaiki mata pencaharian dan praktik pertanian yang berkelanjutan dengan cara:
 - Memberikan pelatihan kepada petani kecil tentang produktifitas, lingkungan, harga yang lebih adil, manajemen dan sertifikasi ISPO.
 - Memperkuat sistem penyuluh pertanian pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan solusi yang berhasil.
 - Bekerja dengan koperasi petani kecil dan perkebunan yang lebih besar untuk mengurangi ekspansi ke hutan.
- Mengurangi deforestasi dengan cara:
 - Mempercepat pertukaran lahan dan penggunaan lahan terdegradasi untuk produksi sawit melalui pengembangan hukum/kebijakan yang menyebabkan berkurangnya penggunaan lahan hutan yang subur.
 - Pengarusutamaan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS) ke dalam perencanaan tata ruang.
 - Memperkuat kasus untuk melindungi HCV/HCS secara legal di dalam konsesi.
 - Mengukur/mengelola emisi Gas Rumah Kaca
- Memperbaiki mekanisme kepemilikan lahan dan mediasi, yaitu dengan:
 - Memberikan dukungan kepada petani sawit mandiri untuk mendapatkan status tanah legal, yang merupakan kunci sertifikasi di bawah RSPO dan ISPO.
 - Memperkuat sistem mediasi konflik lokal, yang mengarah ke penggunaan lahan secara lebih efektif di wilayah tersebut.
- Mengoperasikan skema sertifikasi nasional untuk mendorong sektor minyak sawit lestari dengan cara:
 - Mendukung ISPO untuk mengoperasionalkan dan mengoptimalkan pedoman, sehingga ISPO dapat secara efektif menangani masalah sosial ekonomi dan lingkungan.
 - Mendukung pengembangan sistem audit pihak ketiga bagi ISPO untuk memastikan kredibilitas internasional.

Kemajuan kegiatan Inisiatif Minyak Sawit Berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil Initiative/SPOI*, antara lain:

- *Buy-in* dan kepemilikan Pemerintah Indonesia untuk mendukung minyak sawit lestari.
- Koordinasi antar kementerian diperkuat.
- Reformasi kebijakan diidentifikasi untuk mengatasi akar penyebab deforestasi dari sawit.
- Pengembangan *platform* sawit nasional sejak tahun 2011, disosialisasikan oleh Menteri Pertanian di tahun 2012, dan dioperasikan pada tahun 2013.
- Studi bersama yang membandingkan RSPO dan ISPO sudah tersedia, berfokus pada HCV (*High Conservation Value*) dan FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*)

Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan Sustainable Palm Oil Initiative



Selain beberapa hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja dari masing-masing proyek. Hibah luar negeri lainnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2018 berjumlah 77 proyek, yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 372,73 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, mitigasi bencana, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Kode Hibah | Donor | Nama Proyek | Tanggal Efektif | Nilai Hibah |
|---|------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------|
| Hibah Terencana | | | | | |
| Kementerian Pertanian | | | | | |
| 1 | 71697101 | IFAD | Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesian | 05/06/11 - 31/07/19 | 1,08 |
| Hibah Langsung Barang/Jasa atau Surat Berharga | | | | | |
| Kementerian Pertanian | | | | | |
| 1 | 2HHFZ6PA | JICA | The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System | 09/2015 – 12/2019 | 4,79 |
| 2 | 74886401 | FAO | Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management Implementation and Pesticides Management System in Indonesia (TCP/INS/3403) | 01/2014 – 02/2018 | 0,43 |
| 3 | 29RLUFDA | Government of New Zealand | Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity | 10/09/2015 – 2023 | 5,47 |
| 4 | 74527101 | FAO | Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA) | 09/2013 – 31/07/2017 | 0,65 |
| 5 | 2FYUT388 | Kedutaan Besar Belanda | Food Security Programme in Livestock Components | 25/07/2014 - 25/07/2017 | 5,00 |
| 6 | 74368801 | DAFF | Australia Indonesia Improved Animal Welfare Program 2012 - 2015 (IAWP) | 24/06/2013 –30/06/2015 | 1,66 |

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Kode Hibah | Donor | Nama Proyek | Tanggal Efektif | Nilai Hibah |
|--------------------------------|------------|---|---|-------------------------|-------------|
| 7 | 2SJNWKA | Amerika Serikat | Biosecurity Upgrades at Disease Investigation Centres Maros and Wates | 31/12/2017 | 0,20 |
| 8 | 74527101 | FAO | Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA) | 09/2013 – 31/07/2017 | 0,65 |
| 9 | 74288801 | GARC | Rabies Prevention and Eradication Program Nias | 24/09/2013 - 30/09/2017 | 0,30 |
| 10 | 74368801 | DAFF | Australia Indonesia Improved Animal Welfare Program 2012 - 2015 (IAWP) | 24/06/2013 - 30/06/2015 | 1,62 |
| 11 | 2RPU9TFA | FAO | Emergency Assistance to Rapidly Reduce the Increased Incidence of Rabies in Dogs and Reduce the Risk of Rabies in Humas in Bali Indonesia (TCP/INS/3504) | 03/2016 – 31/05/2017 | 0,32 |
| 12 | 2CFTEZHA | FAO | Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Treats Including Influenza A in Indonesia (OSRO/INS/501/USA) | 01/01/2016 - 30/04/2019 | 16,00 |
| 13 | 2WTVSDDA | United Nation World Food Programme (UN-WFP) | Supporting Government of Indonesia to Collect and Analyse Data on Food Security and Nutrition to Optimize Policies and Programs | 28/11/2017 - 31/12/2020 | 1,20 |
| 14 | 71465701 | AusAID | Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program | 18/01/2011 – 3/12/2018 | 22,12 |
| Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | | | | |
| 1 | 71012601 | DFAT (Australia Prospera Program) | Development of the Indonesian Board of Audit's Performance and Financial Audit Capacity | N/A | 0,24 |
| Kementerian Keuangan | | | | | |
| 1 | 2H816GHA | European Union (EU) melalui WB | Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF) II | 21/03/2016 - 31/12/2018 | 2,70 |
| 2 | 24DE9BGA | IBRD | Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (InIFD) | 25/04/2016 - 31/12/2020 | 8,28 |
| 3 | 21SRT4Y3 | ADB | Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia | 19/12/2014 - 31/12/2017 | 0,73 |
| 4 | 2NAXKEJA | ADB | Enhancing the Regulatory Framework of Financial Sector Development and Oversight | 17/02/2016 - 17/02/2018 | 1,50 |
| 5 | 2UL5W29A | ADB | Promoting Innovative Financial Inclusion (PIFI) | 18/09/2017 - 30/06/2019 | 0,80 |
| 6 | 2Q36JPE4 | UNDP | Sustainable Development Financing | 26/09/ 2014 – 07/2017 | 0,62 |
| 7 | N/A | UNDP | Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) | N/A | 1,00 |
| 8 | 905001 | JICA | Project for Enhancing Tax Monitoring and Enforcement in the DGT through the Prevention of Tax Disputes and Improvement in the Management of Human Resource and Management | 14/07/2014 -.30/06/2018 | 0,79 |
| 9 | N/A | AIPEG | Government Partnership Fund (GPF) | N/A | 0,61 |
| 10 | 2VBMK3A | Pemerintah Australia | Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) | N/A | 0,23 |

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Kode Hibah | Donor | Nama Proyek | Tanggal Efektif | Nilai Hibah |
|--|------------|--|---|---|-------------|
| Kementerian Kesehatan RI | | | | | |
| 1 | 24M4LU9A | The Fred Hollows Foundation (FHF) | The Fred Hollows Foundation (FHF) | 30/08/17 - 31/03/20 | 1,34 |
| Kementerian Sosial | | | | | |
| 1 | N/A | Christoffel Blinden Mission | Program Pencegahan Disabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas | 1/10/2017 – 30/10/2020 | 2,54 |
| LIPI | | | | | |
| 1 | 2K4B84RA | The Royal Botanic Gardens, KEW | Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project Indonesia | 20/03/17 - 13/12/21 | 0,02 |
| Kementerian Energi Sumber Daya Mineral | | | | | |
| 1 | 72198801 | Global Environment Facility (GEF) | Promoting Industrial Energy Efficiency through System Optimization and Energy Management Standards in Indonesia | 03/10/2011 | 2,18 |
| 2 | 2QXHNXNA | New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) | The Demonstration Project for Smart Communities in Industrial Parks | 15/07/2013 dan 28 September 2015 – 31/03/2018 | 2,49 |
| 3 | 2Z17YQRJ | Global Environment Facility (GEF) | NAMA Development of An Efficient Air Conditioning and Process Cooling Supply for the Indonesian Industry and Commerce (Greenchillers) | 17/06/2014 - 30/10/2018 | 5,4 |
| Hibah Langsung Uang | | | | | |
| Kementerian Pertanian | | | | | |
| 1 | 2S36P8TA | FAO | Promoting Sago Starch Utilization in Indonesia (TCP/INS/3503) | 08/2015 – 07/2017 | 0,31 |
| 2 | 233T6GKA | FAO | Analysis and Mapping of Impacts Under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC) | 5/06/2016 – 30/07/2018 | 0,06 |
| 3 | 2YYMH8ZA | ACIAR | Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia | 13/06/2016 - 31/05/2020 | 0,06 |
| 4 | 2XLRA8XA | Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) | Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) project in Indonesia | 01/01/2018 - 31/07/2019 | 0,09 |
| 5 | 72818801 | ACIAR/ Australia | Increasing Productivity of Aallium and Solanaceous Vegetable Crops in Indonesia and Sub-Tropical Australia | 1/04/2012 – 06/2018 | 0,22 |
| 6 | 74680201 | FAO | Reducing Disaster Risks Caused by Changing Climate in Nusa Tenggara Timur (NTT) and Nusa Tenggara Barat (NTB) Provinces in Indonesia | 01/01/2015 - 06/2018 | 3,65 |
| 7 | 2881RS8E | ACIAR | Integrating Herbaceous Forage Legumes Into Crop and Livestock Systems in East Nusa Tenggara, Indonesia | 01/05/2014 - 30/04/2018 | 0,26 |

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Kode Hibah | Donor | Nama Proyek | Tanggal Efektif | Nilai Hibah |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 8 | 2E3ZD2QP | ACIAR | Improving Market Integration for High Value Fruit and Vegetable Production Systems in Indonesia | 01/03/2014 - 28/02/2018 | 0,24 |
| 9 | 2K5KVXJQ | ACIAR | Integrated Disease Management of Sugarcane Streak Mozaic in Indonesia | 01/10/2014 - 31/12/2018 | 0,05 |
| 10 | 2W8R7VVG | ACIAR | Improving Soil and Water Management and Crop Productivity of Dryland Agriculture Systems of Aceh and NSW (SMCN/2012/103) | 01/05/2014 - 28/02/2018 | 0,19 |
| 11 | 2AH9JM5A | Research Council of Norway | Biochar as an Adaptation Strategy for Climate Change | 01/09/ 2015-30/09/2018 | 0,64 |
| 12 | 2CGN1NA | The University of Queensland | BBTV Mitigation: Community Management in Nigeria and Screening Wild Banana Progenitors for Resistance | 20/09/2017 - 30/04/2021 | 0,12 |
| 13 | 2CFGND5A | Arcadia Bioscience, Inc | Limited Field Trial on Rice Nitrogen Use Efficiency (NUE) under Rainfed Lowland Ecosystems in Indonesia | 1/03/2013 – 31/09/2018 | 0,14 |
| 14 | 2KCWVV5A | FAO | Multicountry Construction of A Test Platform for the Development and Allocation of Globally Unique Identifiers for Rice Germplasm, Linking the MLS Information Infrastructure and the DivSeek | 21/06/2016 - 21/06/2019 | 0,36 |
| 15 | 29Q1X59A | FAO | Co-development and Transfer of Rice Technologies | 21/06/2016 - 21/06/2019 | 0,42 |
| 16 | 233T6GKA | FAO | Analysis and Mapping of Impacts under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC) | 5/06/2016 - 30/07/2018 | 0,08 |
| 17 | 2YYMH8ZA | ACIAR | Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia | 13/06/2016 - 31/05/2020 | 0,07 |
| 18 | 2NQF4TMA | OCP S.A Morocco | Improving Soil Fertility and Crop Production through Direct Application of Reactive Phosphate Rock | Januari 2017 - November 2018 | 0,23 |
| 19 | 2HJ9J1NA | ACIAR | Profitable Feeding Strategies for Smallholder Cattle in Indonesia | 01/01/ 2017 – 30/12/2020 | 1,00 |
| 20 | 2251NT3A | CIAT and IFPRI | Harvest Plus Program | 20/04/2017 - 20/04/2018 | 0,06 |
| 21 | 2793QR9A | Michigan State University (MSU) | Feed the Future BiTechnology Partnership | 04/05/2017 – 09/2020 | 0,24 |
| Badan Pusat Statistik (BPS) | | | | | |
| 1 | 2KC5N9AA | UNICEF | Country Program Action Plan 2016-2020 | 19/02/ 2016-31/12/2020 | 0,25 |
| 2 | 2AB9MTXA | UNFPA | UNFPA Siklus ke-9 | 01/01/2016 –31/12/2020 | 0,14 |
| 3 | 72205701 | ADB | International Comparison Program (ICP) RDTA 7507 | 22/01/2016 – 12/ 2017 | 0,02 |

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Kode Hibah | Donor | Nama Proyek | Tanggal Efektif | Nilai Hibah |
|--|------------|---|---|------------------------------------|-------------|
| LAPAN | | | | | |
| 1 | 2KDWR12A | International Council for Science, Regional Office for Asia and the Pacific | International Council for Science | 2/04/2018 – 03/2018 | 0,02 |
| Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | | | | | |
| 1 | N/A | ADB | Polytechnic Education Development Project (PEDP) | 27/02/14 - 31/12/19 | 4,95 |
| Kementerian Kesehatan | | | | | |
| 1 | 70913301 | GAVI | GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization) New Vaccine Support | 02/01/15 - 31/12/18 | 50,16 |
| 2 | 71229501 | WHO | Implementation of MoH RI - WHO Collaborative Programme | 01/01/16 - 31/12/17 | 0,01 |
| 3 | 2E6AZTKA | The Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria | Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievement of the Three Zeros | 01/01/2016 - 31/12/17 | 96,28 |
| 4 | 2W4KQU4A | The Global Fund | Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievement of The Three Zeros (GA 946, IDN-H-NAC) | 01/01/16 - 31/12/17 | 20,07 |
| 5 | 2PAHK2CA | UNFPA | N/A | 29/03/16 - 31/12/17 | 0,49 |
| 6 | 2UFNLPSA | Union | Memperkuat Kebijakan Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Tingkat Nasional dan Sub Nasional (Project Indonesia – R12 – 11C) | 01/10/16 - 30/09/18 | 0,15 |
| 7 | 2JCADNZA | UNFPA | Program Kerjasama Pemerintah RI - UNFPA Siklus 9 (2016-2020) | 29/03/2016 - 31/12/2020 | 0,21 |
| 8 | 2IT8F7KA | UNICEF | Country Programme Action Plan 2016-2020 | 01/01/2016 - 31/12/2020 | 0,42 |
| 9 | 2FG48K2A | Australian National University | Peningkatan Kapasitas di Pemerintahan dan Akademik untuk Pembangunan Kesehatan Berbasis Bukti di Indonesia | 27/10/ 2016-30/06/ 2018 | 0,57 |
| 10 | 2EWGZLRA | JPAIF | Improving Provisions Ambulance for Hospitals in Papua and West Papua | 17/11/ 2016 -tidak ada batas waktu | 0,94 |
| LIPI | | | | | |
| 1 | 2Z5J362A | The National Institutes for The Humanities Jepang | Human-Environmental Security in Asia-Pacific Ring of Fire : Water-Energy-Food Nexus | 15/008/17 - 28/02/18 | 0,01 |
| 2 | 2BLYQHVA | UNESCO | Masterclass Series on Coastal and Marine Resources Management for Sustainable Development | 14/12/17 - 31/05/18 | 0,01 |
| 3 | 2XZS961A | Nanyang Environment and Water Institute, Nanyang Technological University Singapore | Project Improving the Quality of Life in Giriharja Tofu Production Community through Biogas Production from Tofu Wastewater | 01/01/16 - 31/12/17 | 0,12 |

(Ekuivalen Juta USD)

| No | Kode Hibah | Donor | Nama Proyek | Tanggal Efektif | Nilai Hibah |
|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------|
| 4 | 289QPBCA | UNESCO | Enhance the Capacity for Species Identification and Genetic Analysis on Marine Organisms in the Coral Reef Ecosystems in the Western Pacific – Second Phase (DRMREEF-II) | 03/08/17 - 15/12/17* | 0,01 |
| 5 | 24VRQZTA | Posco TJ Park Foundation Korea Selatan | From Entrepreneurship to Social Activist: Self-Transformation and Theorizing Socio-Economic Reintegration of Indonesian Return Migrant from South Korea | 06/07/17 - 19/06/18 | 0,01 |
| 6 | 10881901 | ADB | Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI) | 05/06/14 - 31/12/20 | 30,00 |
| 7 | 25HTPDXA | Intel Foundation | National Youth Science Competition | 9/3/18 - 31/3/18 | 0,02 |
| Kementerian PPN/Bappenas | | | | | |
| 1 | 755-ID | IFAD | PNPM IFAD 755 | 30/09/2016-30/09/2018* | 66,40 |
| 2 | GC 1053 ID | IFAD | PNPM Grant IFAD 1053 | 30/09/2016-30/09/2018* | 0,38 |

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2018 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|---|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | 57,8 | 49,3 | 8,5 | 10,1 | 3,3 | 32,3 |
| <i><u>Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan</u></i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2927-INO | ADB | State Accountability Revitalization Project (STAR) | 19/02/2013 | 30/06/2018 | 57,8 | 49,3 | 8,5 | 10,1 | 3,3 | 32,3 |
| BADAN PENGUSAHAAN BATAM | | | | | | 50,1 | 12,0 | 38,0 | 2,4 | 0,6 | 22,9 |
| 2 | INA-20 | Korea | Development of Sewerage System in Batam Island Project | 29/12/2014 | 29/06/2019 | 50,1 | 12,0 | 38,0 | 2,4 | 0,6 | 22,9 |
| KEMENTERIAN AGAMA | | | | | | 123,8 | 1,8 | 122,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 |
| <i><u>Ditjen Pendidikan Agama Islam</u></i> | | | | | | | | | | | |
| 3 | IND-0164 | IDB | The Support to Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1) | 18/05/2013 | 10/11/2018 | 123,8 | 1,8 | 122,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 |
| KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI | | | | | | 518,1 | 348,1 | 170,0 | 4,2 | 0,2 | 4,5 |
| <i><u>Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u></i> | | | | | | | | | | | |
| 4 | 755-ID | IFAD | Village Development Programme | 17/03/2009 | 31/12/2018 | 68,1 | 59,1 | 9,0 | 4,1 | 0,2 | 4,6 |
| 5 | 8217-ID | Bank Dunia | Village Innovation Project | 22/03/2013 | 31/12/2018 | 450,0 | 289,0 | 161,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | | | | | | 32,5 | 27,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i><u>Ditjen Binlantas</u></i> | | | | | | | | | | | |
| 6 | IND-0159 | IDB | Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project | 23/12/2013 | 30/06/2019 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | IND-0160 | IDB | Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project | 23/12/2013 | 23/12/2017 | 30,0 | 26,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|--|----------------|-------------|--|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 59,3 | 58,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Ditjen Aplikasi Telematika</u> | | | | | | | | | | | |
| 7 | 21686401 | Perancis | Improvement on TV Transmitting Stations (ITTS) - Phase II | 31/12/2014 | 15/12/2018 | 59,3 | 58,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | 5.665,0 | 1.780,0 | 3.885,0 | 758,7 | 174,2 | 23,0 |
| <u>Sekretariat Jenderal</u> | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3455-INO | ADB | Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP) | 21/12/2016 | 20/06/2020 | 148,2 | 1,4 | 146,8 | 28,7 | 0,3 | 1,2 |
| <u>Ditjen Bina Marga</u> | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2817-INO | ADB | Regional Road Development Project (RRDP) | 31/07/2012 | 31/07/2018 | 180,0 | 131,6 | 48,4 | 51,3 | 49,2 | 95,9 |
| | IND-0161 | IDB | Regional Road Development Project (RRDP) | 29/04/2013 | 10/06/2019 | 65,0 | 27,5 | 37,5 | 7,6 | 2,5 | 33,0 |
| 10 | IDN-1012 | IDB | The Development of Trans South-South Java Road Project | 07/11/2017 | 07/11/2021 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | The Development of Trans South-South Java Road Project | | | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 201542 TTL 385 | RR Tiongkok | Toll Road Development of Balikpapan Samarinda Section 5 Project | 30/09/2016 | 30/09/2021 | 53,4 | 9,2 | 44,2 | 10,9 | 2,2 | 20,1 |
| 12 | 2016 1 TTL 389 | RR Tiongkok | Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase II | 30/09/2016 | 30/09/2022 | 219,4 | 58,2 | 161,2 | 25,4 | 20,9 | 82,0 |
| 13 | 2016 7 TTL 395 | RR Tiongkok | Toll Road Development of Manado-Bitung | 30/09/2016 | 30/09/2022 | 78,1 | 18,3 | 59,8 | 10,9 | 6,3 | 57,6 |
| 14 | 21663301 | RR Tiongkok | Toll Road Development of Medan - Kualanamu | 11/03/2013 | 11/03/2018 | 122,4 | 99,5 | 22,9 | 27,0 | 27,0 | 99,9 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|---|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 15 | 201539 TTL 382 | RR Tiongkok | Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I Project | 30/09/2016 | 30/09/2021 | 198,8 | 94,0 | 104,8 | 21,8 | 34,5 | 100,0 |
| 16 | 8043-ID | Bank Dunia | Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP) | 12/03/2012 | 31/12/2018 | 250 | 160,4 | 89,6 | 53 | 0,8 | 1,4 |
| <u>Ditien Cipta Karya</u> | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8259-ID | Bank Dunia | Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II) | 02/08/2013 | 31/12/2018 | 99,9 | 81,1 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 8578-ID | Bank Dunia | Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS III) | 22/08/2016 | 31/12/2020 | 300,0 | 50,7 | 249,3 | 71,7 | 3,5 | 4,9 |
| 19 | 2010 66 471 | Jerman (Kfw) | Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management | 02/05/2013 | 30/06/2018 | 92,6 | 2,5 | 90,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | HS002 16000 | Hongaria | IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas | 01/08/2016 | 31/12/2020 | 36,4 | 16,3 | 20,1 | 2,8 | 3,0 | 100,0 |
| 21 | 2654-INO | ADB | Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) | 22/11/2010 | 31/12/2019 | 35,0 | 22,1 | 12,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | IP-565 | Jepang (JICA) | Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta | 23/06/2014 | 23/06/2021 | 18,5 | 1,4 | 17,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 3123-INO | ADB | Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) | 09/07/2014 | 31/12/2020 | 80,0 | 1,7 | 78,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 8280-INO | ADB/AIF | Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) | 09/07/2014 | 31/12/2020 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 24 | 8213-ID | Bank Dunia | National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015 | 01/03/2013 | 31/12/2018 | 266,0 | 257,6 | 8,4 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | IDN-0174 | IDB | National Slum Upgrading Project | 18/09/2016 | 04/05/2021 | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | IDB | National Slum Upgrading Project | 18/09/2016 | 09/05/2021 | 311,8 | 72,9 | 238,9 | 69,4 | 3,6 | 5,2 |
| | | IDB | National Slum Upgrading Project | 18/09/2016 | 22/11/2021 | 10,0 | 0,7 | 9,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 8636-ID | Bank Dunia | National Slum Upgrading Project | 11/10/2016 | 22/03/2022 | 216,5 | 20,4 | 196,1 | 31,0 | 1,4 | 4,4 |
| 26 | 3122-INO | ADB | Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) | 17/07/2014 | 31/12/2019 | 74,4 | 58,6 | 15,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | IP-564 | Jepang (JICA) | Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II) | 23/06/2014 | 23/06/2019 | 94,1 | 89,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | IND-0167 | IDB | SANIMAS Community-Based Sanitation Project In Indonesia | 29/10/2014 | 29/10/2019 | 100,0 | 38,3 | 61,7 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | DNI-00805-023-T | Spanyol | Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief (SSWTP-ER) | 02/08/2016 | 07/05/2018 | 17,2 | 16,8 | 0,4 | 9,3 | 8,9 | 96,0 |
| <i>Difin Sumber Daya Air</i> | | | | | | | | | | | |
| 30 | IP-575 | Jepang (JICA) | Bali Beach Conservation Project (Phase 2) | 27/07/2017 | 27/07/2025 | 92,5 | 0,0 | 92,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | INA-19 | Korea | Construction of Karian Multipurpose Dam Project | 14/02/2012 | 22/03/2019 | 104,3 | 39,9 | 64,4 | 25,4 | 0,6 | 2,3 |
| 32 | IP-552 | Jepang (JICA) | Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I | 28/07/2009 | 28/07/2018 | 56,9 | 49,7 | 7,1 | 1,8 | 0,1 | 6,2 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|----|-----------|---------------|--|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 33 | IP-567 | Jepang (JICA) | Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II | 23/06/2014 | 23/06/2021 | 46,5 | 5,2 | 41,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | 8711-ID | Bank Dunia | Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II | 04/08/2017 | 30/06/2023 | 125,0 | 0,4 | 124,6 | 41,3 | 0,7 | 1,6 |
| | | AIB | Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II | 04/08/2017 | 30/06/2023 | 125,0 | 0,4 | 124,6 | 41,3 | 0,7 | 1,6 |
| 35 | 3440-INO | ADB | Flood Management in Selected River Basin | 09/12/2016 | 31/12/2022 | 108,7 | 3,5 | 105,3 | 10,8 | 1,5 | 13,4 |
| 36 | 3529-INO | ADB | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) | 08/09/2017 | 30/06/2023 | 500,0 | 42,0 | 458,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 8327-INO | ADB | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) | 08/09/2017 | 30/06/2023 | 100,0 | 8,0 | 92,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | 8121-ID | Bank Dunia | Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) | 18/08/2012 | 28/02/2019 | 139,6 | 85,7 | 53,9 | 12,9 | 1,9 | 14,7 |
| 38 | IP-574 | Jepang (JICA) | Komering Irrigation Project (Phase 3) | 27/07/2017 | 27/07/2025 | 149,1 | 0,0 | 149,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | IP-573 | Jepang (JICA) | Rentang Irrigation Modernization Project | 27/07/2017 | 27/07/2026 | 452,5 | 0,0 | 452,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | IP-559 | Jepang (JICA) | Upper Citarum Basin Flood Management | 25/07/2013 | 25/07/2020 | 31,1 | 7,5 | 23,5 | 7,5 | 0,1 | 1,3 |
| 41 | IP-551 | Jepang (JICA) | Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities | 28/07/2009 | 28/12/2018 | 70,3 | 54,8 | 15,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | IP-566 | Jepang (JICA) | Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II | 23/06/2014 | 23/06/2021 | 48,0 | 35,0 | 12,9 | 2,9 | 1,7 | 59,9 |
| 43 | 8027-ID | Bank Dunia | Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II) | 14/11/2011 | 31/12/2018 | 150,0 | 115,3 | 34,8 | 25,4 | 3,1 | 12,1 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | 1.750,1 | 215,9 | 1.534,2 | 183,9 | 15,6 | 8,5 |
| <i>Ditjen Perhubungan Laut</i> | | | | | | | | | | | |
| 44 | IND-0133 | IDB | The Development of Belawan Port Project Phase I | 01/05/2010 | 05/04/2018 | 87,6 | 19,3 | 68,3 | 37,1 | 1,7 | 4,6 |
| <i>Ditjen Perkeretaapian</i> | | | | | | | | | | | |
| 45 | IP-563 | Jepang (JICA) | Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I | 23/06/2014 | 20/06/2021 | 153,1 | 0,0 | 153,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | IP-577 | Jepang (JICA) | Patimban Port Development Project (I) | 13/03/2018 | 13/03/2026 | 1.115,5 | 0,0 | 1.115,5 | 36,3 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | EXIM PBC 411 | RR Tiongkok | Procurement of Track Material and Turnout Phase II (1500 KM'SP and 500 Unit) | 24/01/2017 | 24/01/2020 | 175,1 | 24,2 | 150,9 | 99,6 | 13,9 | 14,0 |
| 48 | IP-508 | Jepang (JICA) | Railway Electrification and Double-Double Tracking Project I | 13/12/2001 | 11/09/2019 | 218,8 | 172,4 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | 267,5 | 120,2 | 147,3 | 23,8 | 3,9 | 16,2 |
| <i>Badan Ketahanan Pangan</i> | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2000001445 | IFAD | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) | 13/02/2017 | 31/03/2023 | 98,5 | 0,3 | 98,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 2000001960 | IFAD | Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI) | 08/01/2018 | 31/03/2023 | 39,9 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | 835-ID | IFAD | Smallholder Livelihood of Development in Eastern Indonesia (SOLID) | 05/07/2011 | 31/07/2019 | 49,1 | 47,7 | 1,4 | 3,5 | 0,4 | 12,1 |
| <i>Badan Litbang Pertanian</i> | | | | | | | | | | | |
| 52 | 8188-ID | Bank Dunia | Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D) | 25/10/2012 | 30/06/2019 | 80,0 | 72,2 | 7,8 | 17,5 | 3,4 | 19,7 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|---|-----------|---------------|---|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | | | | | | 66,4 | 27,6 | 38,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana</i> | | | | | | | | | | | |
| 53 | IP-568 | Jepang (JICA) | Profesional Human Resources Development IV | 23/06/2014 | 23/06/2023 | 66,4 | 27,6 | 38,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI | | | | | | 917,1 | 387,6 | 529,5 | 105,3 | 3,9 | 3,7 |
| <i>Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi</i> | | | | | | | | | | | |
| 54 | 8245-ID | Bank Dunia | Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro) | 12/06/2013 | 31/12/2020 | 80,0 | 43,0 | 37,0 | 12,9 | 1,6 | 12,4 |
| <i>Ditjen Pendidikan Tinggi</i> | | | | | | | | | | | |
| 55 | IP-553 | Jepang (JICA) | Development of Bandung Institute of Technology III | 28/07/2009 | 28/07/2018 | 53,1 | 34,5 | 18,6 | 5,8 | 0,9 | 15,3 |
| 56 | IP-549 | Jepang (JICA) | Development of World Class University at University of Indonesia | 25/07/2008 | 15/07/2018 | 137,4 | 104,3 | 33,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | IP-576 | Jepang (JICA) | Development of World Class University with Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada | 13/03/2018 | 13/03/2025 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | IP-541 | Jepang (JICA) | Hasanuddin University Engineering Faculty Development | 26/07/2007 | 25/07/2019 | 73,2 | 66,0 | 7,1 | 1,2 | 0,1 | 11,6 |
| 59 | 2928-INO | ADB | Polytechnic Education Development Project | 07/02/2013 | 31/12/2019 | 75,0 | 42,2 | 32,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | IDN-1008 | IDB | The Development of Four Higher Education Institutions Project | 06/11/2016 | 09/06/2021 | 13,9 | 2,3 | 11,6 | 2,9 | 1,3 | 44,8 |
| | | IDB | The Development of Four Higher Education Institutions Project | 06/11/2016 | | 162,6 | 0,0 | 162,6 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | IND-0140 | IDB | The Quality Improvement of Padjadjaran University Project | 24/07/2011 | 31/12/2018 | 26,8 | 21,5 | 5,3 | 3,5 | 0,0 | 0,3 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|---|-----------|---------------|--|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| | IND-0141 | IDB | The Quality Improvement of Padjadjaran University Project | 24/07/2011 | 31/05/2016 | 8,2 | 7,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | IND-0168 | IDB | The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1) | 14/04/2014 | 28/10/2018 | 174,0 | 57,7 | 116,3 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | SFD/9/612 | Saudi Fund | The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1) | 15/09/2014 | 31/12/2018 | 35,0 | 8,7 | 26,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA | | | | | | 75,0 | 28,5 | 46,6 | 17,2 | 5,5 | 31,9 |
| 63 | INA-21 | Korea | Fast Patrol Boats for Indonesian National Police | 15/07/2014 | 27/10/2019 | 35 | 28,0 | 7,1 | 17,2 | 5,5 | 31,9 |
| 64 | INA-18 | Korea | Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police | 14/02/2012 | 22/11/2018 | 40,0 | 0,5 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | | | | | | 47,4 | 20,3 | 27,1 | 8,9 | 2,5 | 27,9 |
| 65 | 8336-ID | Bank Dunia | Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) | 05/06/2014 | 30/06/2020 | 47,4 | 20,3 | 27,1 | 8,9 | 2,5 | 27,9 |
| PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero) | | | | | | 4,6 | 3,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 80,9 |
| 66 | 8192-ID | Bank Dunia | Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) | 12/06/2013 | 31/12/2018 | 4,6 | 3,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 80,9 |
| PT. PERTAMINA | | | | | | 428,0 | 193,3 | 234,7 | 25,8 | 3,9 | 15,0 |
| 67 | 8082-ID | Bank Dunia | Geothermal Clean Energy Investment Project | 29/06/2012 | 31/12/2018 | 175,0 | 139,1 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | IP-557 | Jepang (JICA) | Lumut Balai Geothermal Power Plant Project | 25/10/2011 | 25/10/2019 | 253,0 | 54,2 | 198,8 | 25,8 | 3,9 | 15,0 |
| PT. PLN | | | | | | 2.518,8 | 965,0 | 1.553,8 | 331,1 | 58,1 | 17,6 |
| 69 | IP-532 | Jepang (JICA) | Asahan Hydroelectric Power Plant III | 26/06/2008 | 31/12/2022 | 259,3 | 10,7 | 248,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | IP-555 | Jepang (JICA) | Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection | 31/03/2010 | 31/03/2019 | 36,5 | 14,8 | 21,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|----|--------------|----------------|--|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 71 | IP-572 | Jepang (JICA) | GDAP (Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)) | 14/10/2016 | 14/10/2025 | 6,2 | 0,7 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | 19,0 |
| 72 | 7940-ID | Bank Dunia | Indonesia Power Transmission Development Project (PTD I) | 30/05/2011 | 30/06/2018 | 205,0 | 145,8 | 59,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| 73 | IP-561 | Jepang (JICA) | Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S) | 23/10/2013 | 23/10/2022 | 16,2 | 5,2 | 11,0 | 3,8 | 0,5 | 14,2 |
| 74 | 3083-INO | ADB | Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project | 29/09/2014 | 30/09/2019 | 224,0 | 13,6 | 210,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 8276-INO | ADB/AlF | Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project | 29/09/2014 | 30/09/2019 | 25,0 | 1,5 | 23,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | IP-556 | Jepang (JICA) | Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project | 26/03/2013 | 30/04/2022 | 347,1 | 16,0 | 331,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | EXIM PBC 330 | RR Tiongkok | Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant | 03/06/2015 | 03/06/2020 | 373,0 | 144,2 | 228,8 | 123,2 | 25,0 | 20,3 |
| 77 | 21661901 | RR Tiongkok | Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project | 02/05/2013 | 02/05/2018 | 132,2 | 94,9 | 37,3 | 38,6 | 1,6 | 4,1 |
| 78 | IP-538 | Jepang (JICA) | Peusangan Hydroelectric PP Construction Project | 29/01/2009 | 29/01/2019 | 244,1 | 167,3 | 76,8 | 22,6 | 5,4 | 24,1 |
| 79 | 8280-ID | Bank Dunia | Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II) | 26/03/2014 | 31/12/2019 | 159,6 | 39,5 | 120,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 80 | 26180 | Jerman (Kfw) | Scattered Transmission & Subst, Project (P, 3) | 05/12/2014 | 31/05/2019 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| | CID 1039 01H | Perancis (AFD) | Scattered Transmission & Subst, Project (P, 7) | 25/07/2014 | 30/06/2018 | 20,0 | 1,1 | 18,9 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 28221000 | Jepang (JBIC) | Scattered Transmission & Subst, Project (P, 8) | 19/11/2012 | 30/07/2018 | 19,4 | 3,8 | 15,6 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | CID 1024 01B | Perancis (AFD) | Strengthening West Kalimantan Power Grid | 08/02/2013 | 30/06/2018 | 49,5 | 32,3 | 17,2 | 17,0 | 0,5 | 2,9 |
| | 3015-INO | ADB | West Kalimantan Power Grid Strengthening Project | 04/04/2014 | 30/06/2018 | 49,5 | 32,3 | 17,2 | 10,8 | 0,5 | 4,5 |
| 82 | EXIM PBC 329 | RR Tiongkok | Takalar Coal Fired Steam Power Plant | 29/04/2015 | 29/04/2020 | 241,0 | 185,3 | 55,7 | 60,9 | 16,0 | 26,2 |
| 83 | IP-560 | Jepang (JICA) | Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) | 23/10/2013 | 23/10/2022 | 47,9 | 23,5 | 24,4 | 5,7 | 2,9 | 50,1 |

(Ekuivalen dalam Juta USD)

| No | Kode loan | Lender | Nama Proyek | Tgl Efektif | Tgl Tutup | Nilai Pinjaman | Penyerapan Kumulatif | Pinjaman Belum Ditarik | TA 2018 | | |
|--|-----------|---------------|--|-------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 84 | 8057-ID | Bank Dunia | Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1,040 MW) | 01/05/2012 | 31/12/2018 | 44,0 | 32,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) | | | | | | 300,0 | 12,5 | 287,5 | 12,5 | - | - |
| 85 | 8715-ID | Bank Dunia | Additional Financing For Indonesia Infrastructure Finance Facility Project | 26/09/2017 | 28/02/2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | 8714-ID | Bank Dunia | Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) | 25/09/2017 | 31/12/2020 | 100,0 | 12,5 | 87,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| PEMROV DKI JAKARTA | | | | | | 1.157,4 | 643,0 | 514,4 | 267,7 | 9,4 | 3,5 |
| 87 | IP-554 | Jepang (JICA) | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project | 28/07/2009 | 28/07/2019 | 451,7 | 450,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | IP-571 | Jepang (JICA) | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II | 31/03/2016 | 31/03/2022 | 705,7 | 192,1 | 513,5 | 267,7 | 9,4 | 3,5 |
| LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING (LPKE/KSA) | | | | | | 3.869,4 | 2.157,4 | 1.712,0 | 1.120,5 | 151,4 | 13,5 |
| Kementerian Pertahanan | | | | | | 3633,3 | 2003,6 | 1629,7 | 875,9 | 136,3 | 15,6 |
| Kepolisian RI | | | | | | 236,1 | 153,8 | 82,3 | 244,6 | 15,1 | 6,2 |
| TOTAL | | | | | | 17.908,1 | 7.052,0 | 10.856,2 | 2.944,9 | 433,4 | 14,7 |

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id